

**PRAKTIK BUDAYA DEMOKRASI SANTRI DI DAYAH MODERN
DARUL ‘ULUM YPUI BANDA ACEH**



SKRIPSI

Disusun Oleh:

M. HARIS

NIM. 180801017

MAHASISWA ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Haris
Nim : 180801017
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2023

Yang Menyatakan



M. Haris

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**“PRAKTIK BUDAYA DEMOKRASI SANTRI DI DAYAH
MODERN DARUL ‘ULUM YPUI BANDA ACEH”**

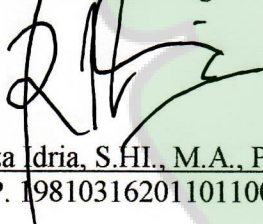
Disusun Oleh:

M. Haris

NIM: 180801017

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Reza Idria, S.HI., M.A., Ph.D
NIP. 198103162011011003

Pembimbing II



Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.SC
NIDN. 2008048903

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Politik,



Rizkika Lhena Darwin, MA
NIP. 198812072018032001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQSAH SKRIPSI

“PRAKTIK BUDAYA DEMOKRASI SANTRI DI DAYAH

MODERN DARUL ‘ULUM YPUI BANDA ACEH”

M. Haris
Nim. 180801017

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) bidang Ilmu Politik

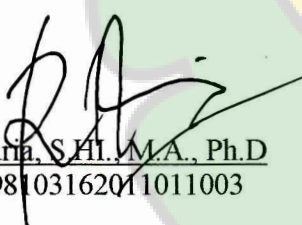
Pada Hari/Tanggal:


Rabu, 04 Januari 2023 M
Rabu, 11 Jumadil Akhir 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

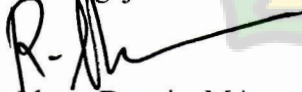
Sekretaris

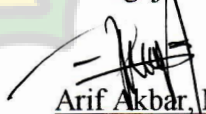

Reza Idria, S.H., M.A., Ph.D
NIP. 198103162011011003


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.SC
NIDN. 2008048903

Penguji I

Penguji II


Rizkika Lhena Darwin, MA
NIP: 198812072018032001


Arif Akbar, M.A.
NIDN. 2024109101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Ruang lingkup demokrasi tidak hanya dalam Negara maupun masyarakat, bahkan ada di pesantren pun ada yang di kenal sebagai santri. Pesantren merupakan suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama islam yang di dukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen. Fenomena di pesantren terkait budaya demokrasi, dengan sebagian peraturan yang tidak demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk. 1) Untuk mengetahui bagaimana praktik budaya demokrasi santri yang terdapat di Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda aceh; 2) Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam menerapkan budaya demokrasi di Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, dimana peneliti akan menghasilkan data-data yang di peroleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya: Praktik budaya demokrasi santri di dayah modern darul ‘ulum dilakukan melalui: 1) proses pembelajaran musyawarah yang langsung dikontrol oleh asatidz. 2) adanya pemilihan ketua organisasi OPDM secara voting. Hambatan-hambatan yang di hadapi Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh dalam praktik budaya demokrasi santri diantaranya yaitu : 1) Perbedaan latar belakanag didikan orang tua santri. 2) ustad dan ustazah yang kadang kala kurang memberikan binaan dalam pengembangan karakter yang demokratis. Upaya-upaya dalam menghadapi hambatan praktik budaya demokrasi santri dayah modern darul ‘ulum YPUI banda aceh sebagai berikut : 1) memberikan bimbingan yang lebih intens kepada santri yang memberontak, membiasakan hidup lebih sederhana, mandiri dan bertanggung jawab. 2) mengadakan evaluasi rutin setiap bulannya untuk mengatasi hambatan atas kelalaian asatidz, agar meminimalisir ketidaksepahaman dan masalah-masalah yang di hadapi oleh asatidz kepada santri.

Kata Kunci: *Praktik, Budaya Demokrasi, Pesantren*

KATA PENGANTAR

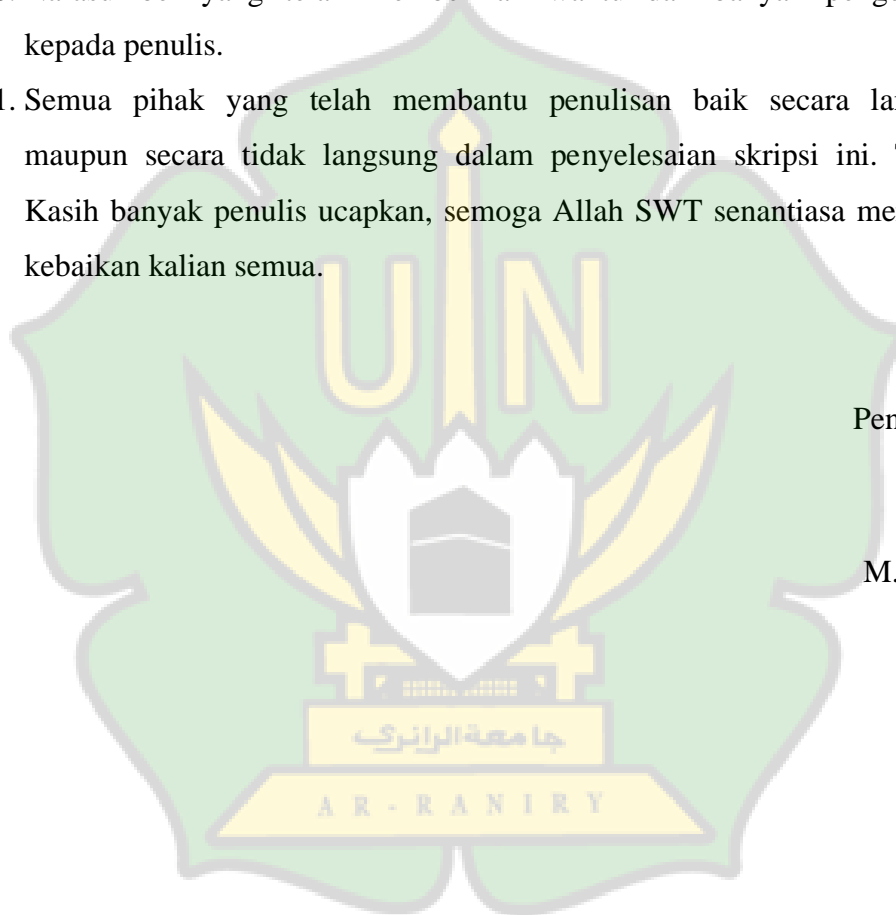
Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, Taufiq, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sangat sederhana ini dengan judul “Praktik Budaya Demokrasi Santri Di Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh”. Shalawat dan salam juga tidak lupa kepada Rasulullah, Nabi Muhammad *shalallahu ‘alaihiwasallam* beserta keluarga dan seluruh sahabat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pembaca.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga besar yang telah mendo’akan dan terus menyemangati, baik dari segi materiil maupun non materiil.
3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
4. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Rizkika Lhena Darwin, S.IP., M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Politik.
6. Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Reza Idria, S.HI., M.A., Ph.D selaku pembimbing I dan Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.SC selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2018, serta teman-teman lainnya. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada almunadi dan maulidi akbar sabahat seperjuangan dari awal menjadi keluarga Ilmu Politik hingga saat ini, yang telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Narasumber yang telah memberikan waktu dan banyak pengetahuan kepada penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.



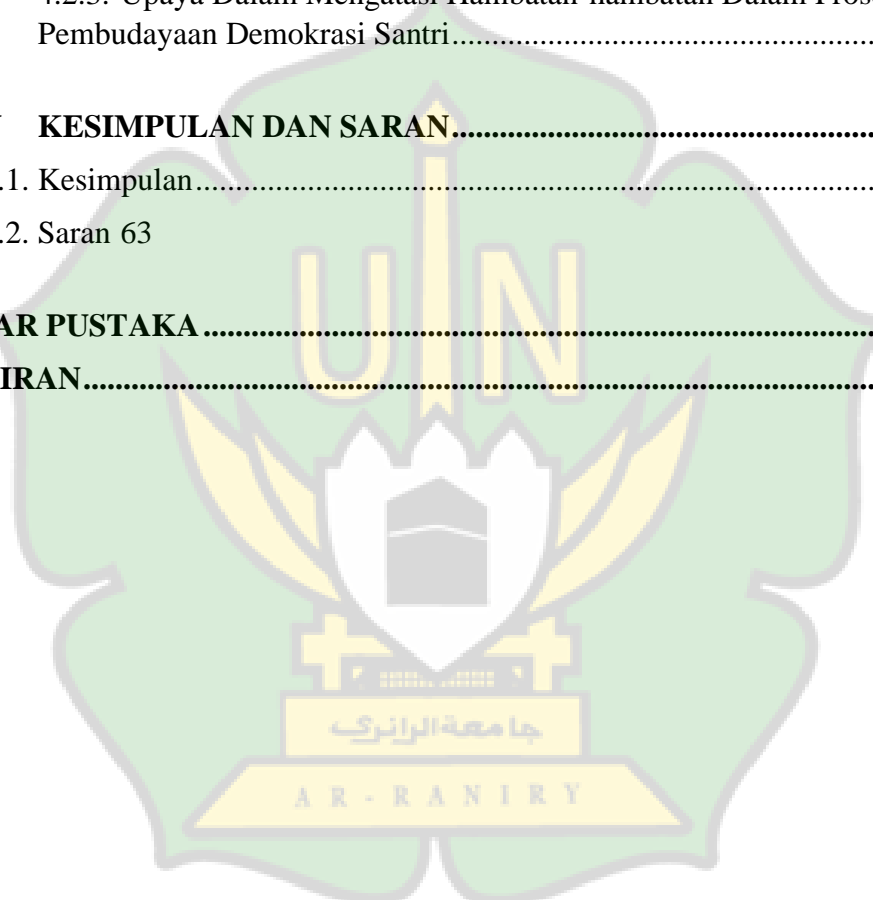
Penyusun

M. Haris

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	10
2.2. Tinjauan Teoritis.....	15
2.2.1. Budaya Demokrasi	15
2.2.2. Pesantren	26
2.3. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Pendekatan Penelitian.....	31
3.2. Fokus Penelitian	31
3.3. Lokasi Penelitian	32
3.4. Jenis dan Sumber Data	32
3.5. Teknik Pengumpulan Data	33
3.6. Teknik Analisis data	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	37
4.1.1. Sejarah Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh	37
4.1.2. Visi Dan Misi Pesantren Darul Ulum	39
4.1.3. Kegiatan Santri Dilingkungan Pesantren	39

4.1.4. Sarana Dan Prasarana.....	40
4.1.5. Struktur Pesantren Darul Ulum.....	40
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	41
4.2.1. Proses Praktik Budaya Demokrasi Santri Di Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh.....	41
4.2.2. Hambatan Dalam Proses Praktik Budaya Demokrasi santri Di Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh.....	56
4.2.3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Dalam Proses Pembudayaan Demokrasi Santri.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran 63	
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah demokrasi pada dua dasawarsa terakhir, khususnya di berbagai negara berkembang kian populer, baik pada tingkat wacana maupun aras gerakan sosial politik. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati stratum teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia. Ambruknya ideologi komunisme Uni Soviet tahun 1989, setidaknya telah menjadi momentum penting bagi perluasan demokrasi sebagai wacana pilihan sistem politik. Kepopuleran demokrasi sebagai ideologi politik secara cepat.

Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi. Jadi dengan kata lain dapat diungkap bahwa demokrasi adalah suatu metode penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara. Namun

demikian, proses kompetisi itu harus tetap dibingkai oleh etika normatif yang mengarah pada terjadinya ekuilibrium sosial¹.

Ruang lingkup demokrasi tidak hanya dalam Negara maupun masyarakat, bahkan ada di pesantren pun ada yang di kenal sebagai santri. Pesantren merupakan suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama islam yang di dukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen.

Sutrisno mengutip pendapat Azyumardi Azra, pesantren yang biasa disebut dengan pondok pesantren atau juga dengan pendidikan tradisional, sekalipun sudah banyak pesantren modern, merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pesantren dipandang sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam *indigenos* karena tradisinya yang panjang di Indonesia. Pesantren pada masa modern dan kontemporer umumnya didirikan oleh Kiai yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama (NU).²

Pesantren juga menarik diperbincangkan karena beberapa argumen ini. Pertama, bahwa pesantren tumbuh dan berkembang pada masyarakat Islam. Kedua, pesantren di Indonesia telah melewati perjalanan panjang. Tidak lama setelah Islam masuk ke Kepulauan Nusantara, embrio cikal bakal munculnya pesantren mulai tumbuh. Ketiga, Indonesia bukan hanya negara yang penduduknya muslim terbesar, melainkan juga memiliki paling banyak pesantren di dunia. Keempat, banyak ilmuwan dan tokoh nasional pernah belajar di pesantren,

¹ Sutrisno, Muji, 2000. *Demokrasi Semudah Ucapankah?* Yogyakarta: Penerbit Kanisius

² Sutrisno, *Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Fasilitama, 2011.

seperti Idham Khalid, A. Mukti Ali, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid (mantan Presiden RI ke-4), Hasyim Muzadi (mantan ketua PBNU), Din Syamsuddin (ketua umum PP Muhammadiyah), dan Hidayat Nur Wahid (mantan ketua MPR).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul beberapa pesantren yang mengembangkan dirinya untuk menghadapi perkembangan zaman. Dalam pertarungan tradisi era modernisme, banyak pesantren yang masih tetap mempertahankan tradisi utamanya sebagai pesantren tradisional, di sisi lain muncul beberapa pesantren yang mengembangkan dirinya menjadi pesantren modern agar dapat bersaing dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang berkembang di lembaga pendidikan model sekolah. Dalam penelitian ini, penulis mencoba akan mengupas perkembangan pesantren dari Salafiyah, Khalaf, dan Modern hingga munculnya Ma'had Aly serta problematikanya dalam mempertahankan tradisi di tengah-tengah perubahan sosial serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi era modernisme.

Budaya demokrasi pada dasarnya ialah membiasakan hidup secara bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang ada di pesantren dengan mendengarkan pendapat dari orang melalui musyawarah, maka oleh itu akan timbul dengan sendirinya karakter budaya demokrasi seperti sikap saling menghormati sesama santri, santri dan pendidik di pesantren, dan mendapat hak-

hak asasi individu dalam mengemukakan pendapat sehingga dapat mewujudkan budaya demokrasi di pesantren.³

Dalam konteks pesantren atau dayah, dwi Ratna Dewi berhasil melakukan penelitian tentang “Kajian Tentang Budaya Demokrasi di Pesantren Al- Basyariah Bandung Dalam Mengembangkan *Civic Disposition* Santri” yang kemudian dijadikan sebagai skripsi tesis.⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat, kesamaan dalam kesempatan dan kemandirian ada di dayah sehingga nilai – nilai demokrasi masih terus hidup di lingkungan dayah Al – Basyariah dan ustad-ustdzah mampu menumbuhkan karakter yang jujur, disiplin dan mandiri sehingga menciptakan santri agen moral bangsa, agar tidak tercabut dari realitas sosial yang kekinian dan meninggalkan ajaran – ajaran yang sudah di dapat di pesantren.

Ada perbedaan karakter dalam lingkungan pesantren itu terbagi ke dalam dua kategori, yaitu tradisional dan modern. istilah pesantren Salafi di tengah-tengah masyarakat mengandung dua pemahaman yang berbeda. Pertama, pesantren Salafi dimaknai sebagai pesantren tradisional yang tetap mempertahankan kitab-kitab klasik serta mengapresiasi budaya setempat. Kedua, pesantren Salafi dimaknai sebagai pesantren yang secara konsisten mengikuti ajaran ulama generasi sahabat, tabi’in, tabi’at tabi’in yang memiliki kecenderungan pada penafsiran teks secara normatif dan tidak/kurang

³ Abdurrahman Wahid, *Pesantren Sebagai Subkultur*, dalam M Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaruan* (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 40-60

⁴ Dewi, Dwi Ratna, *Kajian Tentang Budaya Demokrasi Di Pesantren Dalam Mengembangkan Civic Disposition Santri : Studi Deskriptif di Pesantren Al-Basyariah Bandung*, 2013

mengapresiasi budaya setempat, karena semua budaya harus sesuai dengan zaman para Salafush-Sholih, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in.

Sedangkan pesantren modern, selain belajar agama, juga memiliki pendidikan formal dan Pesantren Modern di mana tradisi Salaf masih ada walaupun tidak seperti pesantren salafi. Pengajaran kitab-kitab Islam klasik tetap diselenggarakan. Sekalipun bahasa Arab diajarkan, namun penguasaannya tidak diarahkan untuk memahami bahasa Arab terdapat dalam kitab-kitab klasik. Penguasaan bahasa Arab dan Inggris cenderung ditujukan untuk kepentingan-kepentingan praktis.

Menurut peneliti, istilah Khalafi kadang juga diartikan sebagai Modern, antonim dari istilah Salafi. Pesantren Khalafi juga berarti pesantren Modern. Tapi, dalam hal ini Ramayulis membedakannya. Pendapat Ramayulis tersebut ditekankan pada tradisi kajian kitab-kitab klasik. Bagi pesantren Khalafi, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan memelihara tradisi (mengkaji kitab klasik) adalah ciri khasnya. Kitab klasik menjadi kajian utama di pesantren Salafi/Khalafi dan biasanya, ketika mengkaji kitab klasik tertentu sampai selesai (khatam). Misalnya: mengkaji kitab Tafsir Jalalain sampai khatam. Bagi pesantren modern, tidak lagi mengutamakan kajian kitab-kitab klasik dalam proses pembelajaran, tapi kitab-kitab berbahasa Arab yang ditulis oleh para tokoh muslim abad 20. Walaupun kadang di pesantren Modern masih menggunakan sebagian kitab-kitab klasik, tapi bukan menjadi kajian utamanya, tapi hanya menjadi referensi tambahan dan tidak dikaji sampai selesai (khatam). Di samping itu, pondok modern juga menekankan pada penguasaan bahasa asing, seperti

bahasa Arab dan bahasa Inggris dan budaya kedisiplinan yang sangat ketat. Penguasaan bahasa asing ini untuk membekali para santri agar dapat bersaing di dunia global dan dapat membaca kitab-kitab kontemporer baik yang menggunakan bahasa Arab maupun bahasa Inggris.

Pesantren yang demokratis akan menanamkan nilai demokrasi dalam penyelenggaraan proses pembelajaran.⁵ Pelaksanaan nilai demokrasi di pesantren berjalan apabila penerapan nilai-nilai demokrasi memenuhi beberapa indikator sebagai berikut :

1. Kurikulum yang fleksibel.
2. Menggunakan buku sumber yang beragam.
3. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terwujudnya nilai demokrasi.
4. Pendidik yang bersikap demokratis, pendidik dapat menerima perbedaan, menghargai pendapat orang lain, dan menciptakan suasana yang demokratis.

Menurut Hamidi semua kebebasan tidak dapat disamakan dengan demokrasi, atau dengan kata lain demokrasi bukanlah berarti kebebasan yang tidak terkendali, melainkan mengandung makna luas. Secara komprehensif budaya demokrasi mengandung unsur-unsur antara lain : kebebasan, persamaan, solidaritas, toleransi, menghormati kejujuran, menghormati penalaran, dan keadaban.⁶

⁵ Agusta, L. Politik Demokrasi Tanpa Budaya Demokrasi. Pidato Kebudayaan. 2013

⁶ Ahmad, Z. A, Republik Islam Demokrasi, Deli: pustaka Maju. 1951

Namun peneliti ingin memfokuskan penelitian ini pada praktik budaya demokrasi santri yang telah diimplementasikan dan hambatannya di Dayah Modern Darul 'Ulum Kota Banda Aceh. Praktik budaya demokrasi di Dayah Darul 'Ulum dengan karakter yang berbeda-beda.

Dayah ini peneliti pilih sebagai target penelitian karena dayah darul 'ulum YPUI banda aceh telah melaksanakan pemilihan ketua umum organisasi biasa disebut dengan OPDM dengan metode voting oleh seluruh warga di dayah yang telah direalisasikan oleh pihak pusat dayah dan sudah ada pula kebijakan-kebijakan yang organisasi tersebut yang telah mendapat persetujuan oleh pihak pusat dayah, kemudian ada di kalangan santri dalam menyelesaikan permasalahan dengan metode musyawarah dan kemudian adanya pembentukan karakter yang mandiri dan disiplin saat memasuki dayah, artinya dayah darul 'ulum YPUI Banda Aceh merupakan salah satu dayah modern yang demokrasi. Namun menariknya, terdapat beberapa hal yang memang belum maksimal dalam pelaksanaan atau praktik demokrasi yang dilakukan.

Beda hal nya dengan dayah modern lain yang berada di Kota Banda Aceh, bahwasanya *absolute power* berada di bawah perintah pimpinan dayah dan para asatidz apalagi dayah salafi yang memang sejak awal semua nya di bawah kepemimpinan dan arahan pimpinan dayah sehingga peneliti tidak melihat adanya budaya yang demokratis dilingkungan dayah Kota Banda Aceh.

Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian terkait perkembangan budaya demokrasi santri di dayah, dengan kata lain judul penelitian ini adalah **“Praktik Budaya Demokrasi Santri Di Dayah Modern Darul Ulum YPUI Banda Aceh”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik budaya demokrasi yang telah diimplementasikan di Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan dalam menerapkan budaya demokrasi di Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik budaya demokrasi santri yang terdapat di Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam menerapkan budaya demokrasi di Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh.

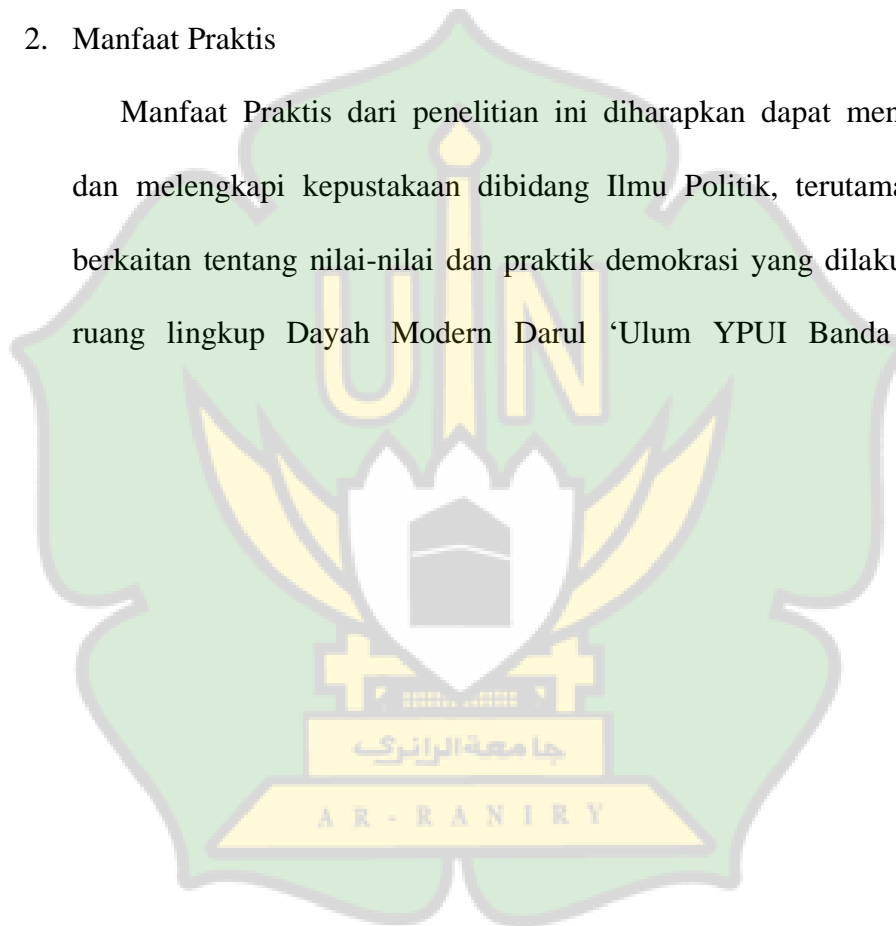
1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya khasanah keilmuan Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang nilai-nilai dan praktik demokrasi yang dilakukan di ruang lingkup Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkasan dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian. Tinjauan Pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, pemikiran. Kegunaan tinjauan Pustaka adalah memberikan acuan komprehensif mengenai prinsip atau konsep yang digunakan dalam pemecahan masalah.

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kajian ini bukanlah yang pertama diteliti, akan tetapi sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji persoalan tersebut. Namun kajian ini dilakukan di lokasi dan objek yang berbeda yaitu pada praktik budaya demokrasi santri di pesantren modern darul ulum banda aceh.

Muhammad Japar dkk, dalam jurnal yang berjudul “Membangun Budaya Demokrasi di Sekolah Melalui *Jurisprudential Inquiry*” Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Jurnal Kependidikan tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di SMA Labschool Jakarta. Pada penelitian ini Muhammad Japar menggunakan konsep *Jurisprudential Inquiry*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengamati penanaman nilai-nilai demokrasi yang diterapkan dalam mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan dengan menerapkan model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry*.

Ia menyimpulkan bahwa model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry* dapat membangun demokrasi siswa ditunjukkan dengan siswa ikut berpartisipasi aktif di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, siswa mampu menghargai setiap keputusan yang diambil oleh siswa lainnya dalam setiap argumen yang diberikan oleh siswa lainnya. Siswa juga mampu memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Siswa juga dibiasakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Siswa mampu menjalankan tanggung jawabnya baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah dengan cara mentaati setiap peraturan yang ada di sekolah.

Selanjutnya Ninis Ristiani Septialiana, dalam skripsinya yang berjudul “ Hubungan Antara Pemahaman Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Dengan Sikap Demokrasi Pada Siswa Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 2010/2011”. Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2011. Objektif pada kajian ini yang ialah sehubungan dengan rendahnya pemahaman demokrasi siswa memungkinkan pula rendahnya sikap demokrasi yang dimiliki siswa. Kedua pemahaman demokrasi kemungkinan memiliki hubungan yang erat dengan sikap demokrasi yang dimiliki pada siswa. Ketiga pemahaman budaya demokrasi kemungkinan memiliki hubungan erat dengan sikap demokrasi yang dimiliki pada siswa. Keempat semakin meningkatnya tingkat kenakalan siswa yang mengarah pada pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Kelima Banyaknya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap demokrasi pada siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar. Lokasi penelitian dilakukan di sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar. Konsep yang digunakan pada

penelitian merupakan psikologi kognitif adalah kajian ilmiah mengenai proses-proses mental atau pikiran. Bagaimana informasi yang diperoleh, dipresentasikan dan ditransformasikan sebagai pengetahuan.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 2 Karanganyar tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 298 siswa. Sampel diambil dengan teknik random sampling dan diperoleh sampel sejumlah 59 siswa. Nini menyimpulkan ada hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman demokrasi dengan sikap demokrasi, dan hubungan yang positif dan signifikan antara budaya demokrasi dengan sikap. Ada hubungan yang positif dan signifikan secara simultan antara pemahaman demokrasi dan budaya demokrasi dengan sikap.

Regita Dyah Prameswari dkk, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Budaya Demokrasi di Sekolah dan Pembentukan Karakter Peserta Didik Kelas V SD Al-Kautsar. Universitas Lampung tahun 2019. Objektif pada kajian ini adalah pelaksanaan budaya demokrasi di SD Al-Kautsar. Pelaksanaan pembentukan karakter di SD Al-Kautsar. Upaya sekolah dalam pelaksanaan budaya demokrasi. Upaya sekolah dalam pembentukan karakter peserta didik kelas V SD Al-Kautsar. Metode penelitian pada kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data kepala sekolah, pendidik, peserta didik dan staff tata usaha. Fokus pada kajian ini ialah studi deskriptif budaya demokrasi dan pembentukan karakter peserta didik kelas V SD Al-Kautsar.

Regita dkk menyimpulkan bahwa pelaksanaan budaya demokrasi sudah dilaksanakan hal ini terlihat dari sudah dilaksanakannya nilai-nilai demokrasi dan sudah diterapkan unsur-unsur budaya demokrasi. Pembentukan karakter di SD Al-Kautsar dilaksanakan melalui Pendidikan karakter dan dilakukan lewat pembiasaan. Upaya yang dilakukan oleh SD Al-Kautsar dalam pelaksanaan budaya demokrasi meliputi perencanaan sekolah dalam pelaksanaan budaya demokrasi dan program sekolah untuk pelaksanaan budaya demokrasi. Upaya SD Al-Kautsar dalam pembentukan karakter religius, disiplin, peduli lingkungan dan tanggung jawab dilakukan dengan dibuatnya program-program yang dapat membentuk karakter peserta didik.

Ok. M. Daniel Syahindra, dalam jurnalnya yang berjudul “Pengembangan Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah”. Jurnal Hikmah tahun 2019. Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan di mana rakyat memegang suatu peranan yang sangat menentukan. Nilai-nilai demokrasi perlu ditanamkan pada generasi muda agar terbentuk generasi muda yang demokratis. Tujuan pelaksanaan demokrasi Pancasila disekolah yaitu mendidik anak-anak dan mengantarkan mereka menuju fase kedewasaan, agar mereka mandiri baik secara psikologis maupun social dengan menitik beratkan pada pengembangan ketrampilan intelektual, ketrampilan.

Muhammad Anwar Rube’I dan Andi Ridwansyah dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Budaya Demokrasi Untuk Membentuk *Civic Disposition* Pada Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP-PGRI Pontianak”. Jurnal IKIP-PGRI Pontianak, tahun 2017. Wujud nilai budaya

demokrasi yang diimplementasikan oleh HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak untuk membentuk watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*). Program kegiatan implementasi budaya demokrasi untuk membentuk *Civic Disposition* pada HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak. Pembentuk watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) pada HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dengan mereduksi, menyajikan, dan menyimpulkan data.

Mereka menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan budaya demokrasi yang dilaksanakan oleh HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak selama ini sudah mencerminkan nilai-nilai demokrasi yaitu memiliki kepribadian demokratis, memberikan kebebasan mengemukakan pendapat, memiliki tanggung jawab, memiliki sikap toleransi, memiliki rasa nasionalisme, dan memiliki kebersamaan. Apa bila nilai-nilai budaya demokrasi dilaksanakan dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap pembentukan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) pada mahasiswa.

Kelima kajian diatas sangat relevan karena sama-sama mengkaji tentang budaya demokrasi menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya kajian ini fokus pada praktik Budaya demokrasi santri dan juga lokasi nya pun berbeda, sedangkan Regita Dyah fokus pada kajian Analisis budaya demokrasi, selanjutnya Ninis Ristiani fokus pada kajian Hubungan antara demokrasi dan budaya

demokrasi. Oleh karena itu, judul penelitian ini baru di buat oleh peneliti di Aceh khusus nya di Banda Aceh.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Budaya Demokrasi

Kebudayaan kultur (bahasa Belanda) kultur (bahasa Inggris) berasal dari perkataan Latin “*Colere*” yang berarti mengolah, mengerjakan menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti *culture* sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”.

Menurut Almond dan Verba, Budaya Merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik.⁷ Makna budaya dan kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah dua istilah yang dipersamakan. Dalam istilah antropologi budaya, kata budaya dipakai sebagai singkatan dari kebudayaan dengan arti yang sama. Berdasarkan kajian tersebut, penggunaan istilah budaya dan kebudayaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah memiliki makna yang sama.⁸

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*Demokratia*” yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata “*Demos*” dan “*Kratos*”. *Demos* yang memiliki arti rakyat dan *Kratos* yang memiliki arti kekuasaan. Menurut

⁷ Gafar, Afan. (2006). *Politik Indonesia Transisi menuju demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Hal. 3

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2016). *Panduan Pembelajaran Untuk Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.⁹

Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.¹⁰

Menurut Hamidi semua kebebasan tidak dapat disamakan dengan demokrasi, atau dengan kata lain demokrasi bukanlah berarti kebebasan yang tidak terkendali, melainkan mengandung makna luas. Secara komprehensif budaya demokrasi mengandung unsur-unsur antara lain : kebebasan, persamaan, solidaritas, toleransi, menghormati kejujuran, menghormati penalaran, dan keadaban.¹¹

Abraham Lincoln¹² mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

⁹ Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal.125

¹⁰ Suyatno, *Menjelajah Demokrasi*. (Bandung: Humaniora2008).

¹¹ Ahmad, Z. A, *Republik Islam Demokrasi*, Deli: pustaka Maju. 1951

¹² Paul Fors, Bryant, *History Of American Political Thought*, (America: Lexington Books, 2003). Hal 395.

Dalam negara yang menganut demokrasi, rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang setara dalam hal ikut serta menjalankan negara. Supaya demokrasi bisa berjalan sebagaimana yang seharusnya, setiap warga negara harus mau dan mampu bekerja sama, saling menghargai, saling mempercayai, toleransi, adanya solidaritas mengakui kesetaraan, mengakui keanekaragaman dan bersedia mengadakan kompromi. Tanpa adanya demokrasi tidak akan berarti.

Deklarasi Warsawa yang turut ditandatangani oleh tiga menteri luar negeri dari tiga negara ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, dan Thailand dalam *Ministerial Conference Toward a Community of Democracies* di Warsawa, Polandia tanggal 27 Juni Tahun 2000 menegaskan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup 19 aspek:¹³

1. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, melalui pelaksanaan tugas yang tepat dan warga negara sipil memilih wakil-wakil mereka secara literatur melalui pemilu yang bebas dan adil dengan hak pilih yang universal dan sama, terbuka untuk semua pihak, dilakukan secara rahasia, dipantau oleh otoritas pemilu yang independen, dan bebas dari penipuan dan intimidasi.
2. Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama ke layanan publik dan untuk mengambil bagian dalam urusan publik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

¹³ Ekawahyu Kasih, *Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edivis 34, (2018). Hal 52

3. Hak setiap orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
4. Hak setiap orang atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk bertukar dan menerima ide dan informasi melalui media apapun tanpa batas.
5. Hak setiap orang atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama.
6. Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama atas pendidikan.
7. Hak pers untuk mengumpulkan, melaporkan, menyebarluaskan informasi, berita, dan opini, tunduk hanya pada pembatasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis dan ditentukan oleh hukum dan praktik-praktik internasional yang berkembang di bidang ini.
8. Hak setiap orang untuk menghormati kehidupan pribadi keluarga, rumah, dan cara-cara berkomunikasi termasuk komunikasi elektronik, bebas dari campur tangan sewenang-wenang atau melanggar hukum.
9. Hak setiap orang atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, termasuk untuk membentuk atau bergabung dengan partai politik mereka sendiri, kelompok-kelompok sipil, serikat buruh atau organisasi lainnya dengan jaminan hukum yang diperlukan untuk memungkinkan mereka beroperasi secara bebas atas dasar perlakuan yang sama dihadapkan hukum.

10. Hak kelompok minoritas atau kelompok yang kurang beruntung untuk perlindungan hukum yang sama dan kebebasan untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menganut dan menjalankan agama mereka sendiri, dan menggunakan bahasa mereka sendiri.
11. Hak setiap orang untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang atau penahan; untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman lainnya, dan untuk menerima proses hukum, termasuk untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan hukum.
12. Bahwa hak-hak tersebut, yang penting untuk partisipasi penuh dan efektif dalam suatu masyarakat demokratis, harus ditegakkan oleh peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak, dan terbuka untuk umum, didirikan dan dilindungi oleh hukum.
13. Bahwa pemimpin terpilih menjunjung tinggi hukum dan fungsi secara ketat sesuai dengan konstitusi negara yang bersangkutan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
14. Hak orang-orang yang terpilih untuk membentuk pemerintahan, memangku jabatan, dan memenuhi masa jabatan sebagaimana ditetapkan secara hukum.
15. Kewajiban pemerintah yang dipilih untuk menahan diri dari tindakan ekstra konstitusional, untuk memungkinkan penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala dan menghormati hasilnya, dan melepaskan kekuasaan tersebut ketika mandat berakhir secara hukum.

16. Bahwa institusi pemerintah harus transparan, partisipatif, dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada warga negara dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi korupsi.
17. Bahwa legislatif akan terpilih secara transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat.
18. Bahwa kontrol sipil demokratis atas militer harus dibentuk dan dilestarikan.
19. Bahwa semua hak asasi manusia baik sipil, budaya, ekonomi, politik, maupun sosial, akan dipromosikan dan dilindungi sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia serta instrumen hak asasi manusia lainnya yang relevan.

Berdasarkan pengertian di atas budaya demokrasi bisa dipahami sebagai pola sikap dan tingkah laku serta orientasi politik yang berasal pada nilai-nilai kerja sama mengurus pemerintahan negara guna mencapai tujuan negara yang sudah ditetapkan bersama dalam Undang-Undang Dasar.

Budaya demokrasi tidak dibawa sejak lahir, nilai-nilai dan budaya demokrasi harus dipelajari. Proses demokratisasi di Indonesia perlu tompangan struktur dan budaya yang demokratis. Untuk membangun masyarakat yang demokratis harus dibarengi dengan suatu rekayasa sistematis untuk membangun struktur sosial politik dan kultur yang demokratis.

Menurut Almond upaya untuk membangun budaya demokrasi harus melewati tiga tahap. Pertama pengembangan institusi yang demokratis. Kedua

menciptakan kondisi sosial dan personalitas individu yang mendukung terwujudnya demokrasi. Sehingga mendorong interaksi yang sehat dikalangan anggota masyarakat. Interaksi tersebut akan terwujud jika masyarakat menerapkan prinsip kesetaraan derajat, kesamaan atas keterlibatan dan keterbukaan. Sehingga nilai-nilai kejujuran dapat tumbuh subur begitupun dengan keadilan dan tanggung jawab. Ketiga mewujudkan struktur sosial dan kultur politik yang demokratis, sehingga pola-pola interaksi yang sehat menjadi modal munculnya komunitas responsif. Pembangunan budaya demokrasi ini tidak dapat dilepaskan dari pembentukan iklim sosial yang kondusif bagi munculnya sikap toleran, egaliter dan partisipatif.¹⁴

Secara sosiologis Tindakan manusia selalu terjadi dalam konteks kemasyarakatan. Suryadi mengatakan bahwa tiga karakter strategis yang harus dikembangkan, yaitu kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Proses penerapan dan penguatan nilai-nilai budaya ini haruslah menghindari cara-cara pemaksaan.¹⁵

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa Pendidikan sebagai salah satu instrumen (sekalipun bukan satu-satunya) untuk membangun kultur demokrasi melalui pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam proses Pendidikan, terutama melalui *civic education*, dimulai dari tingkat paling dasar hingga ke tingkat perguruan tinggi.

Demokrasi yang sehat akan bergantung pada pengembangan budaya masyarakat yang demokratis. Budaya dalam artian nilai-nilai, perilaku, praktik-

¹⁴ Winarno, Budi. *Sistem politik Indonesia era reformasi*. Gramedia Pustaka Utama, 2007.

¹⁵ Bambang Yuniarto, B. Y. *Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional*. 2018.

praktik dan norma-norma yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengatur diri sendiri, eratnya hubungan tingkah laku dan budaya satu sama lain.

Budaya demokrasi adalah alas bagi berjalannya konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi merupakan Gerakan demokratisasi dalam membangun dan memperkuat masyarakat sipil. Dikarenakan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadi kekuatan alternatif dalam proses konsolidasi demokrasi.¹⁶

Budaya demokrasi pada dasarnya membiasakan hidup secara bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang ada dengan mendengarkan pendapat dari orang lain melalui musyawarah.¹⁷

A. Musyawarah

Dalam kamus Bahasa Indonesia musyawarah diartikan sebagai pembahasan Bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama, di samping itu musyawarah juga diartikan berunding atau berembuk.¹⁸

Secara terminologi Abdul Hamid mendefinisikan musyawarah berarti saling merundingkan atau memberikan pendapat mengenai suatu persoalan atau

¹⁶ Bambang Yuniarto, *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 89-92.

¹⁷ Regita Dyah dkk, *Analisis Budaya Demokrasi dan Pembentukan Karakter Peserta Didik Kelas V Al-Kautsar*, Jurnal Skripsi, Bandar Lampung, 2019. Hal 4.

¹⁸ Qurays Shihab, *Ensiklopedia Al-Quran Kajian Kosakata*, (Jakarta, Lentera Hati, 2007), hal 966.

mengeluarkan pendapat dari berbagai pihak kemudian dipertimbangkan dan diambil keputusan sesuai kesepakatan bersama.¹⁹

Musyawarah atau *syura* diartikan dalam arti umum mencakup segala bentuk pemberian pendapat dan bertukar pendapat, dalam artian sempit musyawarah diartikan sebagai keputusan jamaah. Prinsip *syura* mempunyai arti yaitu setiap ketetapan yang ditentukan dalam jamaah harus merupakan bukti dari kehendak *jumhurul jamaah* atau segenap individunya. Luasnya jangkauan musyawarah merupakan faktor utama yang membedakannya dengan demokrasi yang esensinya hari ini ialah, pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat dalam memilih orang-orang yang akan mengatur dan mengurus urusan mereka.

Musyawarah merupakan keutamaan yang manusiawi, ia merupakan jalan lurus untuk mengetahui dan mengungkapkan pendapat-pendapat dengan tujuan mencapai kebenaran yang sesungguhnya serta kejelasan dalam setiap permasalahan.²⁰

Esensi musyawarah merupakan sistem penyusunan hukum merupakan cara untuk mengetahui dan menghimpun kebenaran pendapat melalui diskusi ilmiah. Cara seperti ini mampu memberi peluang bagi setiap individu untuk berdialog dengan landasan argumentasi ilmiah. Musyawarah juga memegang peran penting sebagai pelindung rakyat, karena musyawarah merupakan alat masyarakat untuk menyampaikan kehendak, musyawarah juga dapat menghindari sikap pemimpin

¹⁹ Dudung Abdullah, *Musyawarah dalam Al-Quran (suatu kajian tematik)* Jurnal: Ad-Daulati, Vol. III, No. 2, Desember 2014, hal. 245

²⁰ Hemay, Idris. "MENILAI POLITIK ELEKTORAL DENGAN TROPONG PRINSIP MUSYAWARAH MUFAKAT." JURNAL MAJELIS: 91.

yang semena-mena hal ini juga bisa menghindari pelanggaran dan juga kelakuan zalim.²¹

B. Voting

Voting merupakan proses pemungutan suara untuk menyetujui, menolak atau memilih satu atau lebih pilihan yang tidak bisa dicapai oleh musyawarah untuk mufakat.²² Selain itu voting juga merupakan salah satu metode untuk mempermudah mengambil suatu keputusan.²³ Mulai dari tingkat masyarakat hingga ke tingkat Negara menggunakan voting untuk menghimpun aspirasi keseluruhan dan kemudian sampai menemukan jalan keluar yang sudah dianggap dapat menyelesaikan masalah.

Dalam sebuah negara yang menganut sistem politik demokrasi, voting digunakan sebagai salah satu media penentu dalam mengambil keputusan dalam pemilihan kepala daerah hingga presiden.²⁴ Dalam dunia yang berdemokrasi, oleh karena itu, voting membutuhkan regulasi dan prosedur agar lebih menjamin kerahasiaannya serta dapat berjalan dengan jujur dan transparansi.

Tujuan dari voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan perhitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang

²¹ Muhammad Hanafi, *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal: Cita Hukum, Vol. I, No. 2. Desember 2013.

²² Rozi, C. F., & Dewi, S. V. (2020). *Rancang bangun aplikasi e-voting pemilihan geuchik pada kecamatan kluet utara (sk: di desa krueng batee) berbasis web*. Journal of Informatics and Computer Science, 6(1), 1-10.

²³ Ramdhani, A. I., & Marwanto, E. (2022). *Perancangan Program Aplikasi E-Voting Untuk Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Pada Kampus Stmik Bani Saleh Menggunakan Framework Laravel*. Jurnal Gerbang STMIK Bani Saleh, 12(2).

²⁴ Jaleha, S., & Suriyani, E. (2020). *Implementasi Sistem E-Voting Dilihat Aspek Komunikasi Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong*. Japb, 3(2), 1253-1264.

aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan voting perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali.

1. Bentuk-Bentuk Voting

Voting sendiri dapat dikategorikan menjadi dua yaitu voting terbuka dan voting tertutup.²⁵

- a) Voting terbuka adalah pemungutan suara secara terbuka dan bersifat tidak rahasia, sehingga suara yang diberikan oleh peserta dapat diketahui oleh peserta yang lain. Voting terbuka biasanya dilakukan dengan cara peserta mengacungkan jari dan ada juga yang berdiri bersama.
- b) Voting tertutup adalah pemungutan suara yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Artinya jenis voting ini hasil pilihan peserta tidak diketahui oleh peserta lain kecuali orang yang bersangkutan memberi tahu peserta yang lain.

2. Manfaat Voting

Penerapan voting diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional. Manfaat yang akan diperoleh dalam penerapan voting sebagai berikut:²⁶

- a) Mempercepat penghitungan suara.
- b) Hasil penghitungan suara lebih akurat.

²⁵ Srimadona, Skripsi: *Titik Temu Antara Voting Dan Syura Dalam Pemilihan Pemimpin di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam*, (Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri, 2022), Hal 18

²⁶ *Ibid*

- c) Menghemat bahan cetakan kertas suara.
- d) Menghemat biaya pengiriman kertas suara.
- e) Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat).
- f) Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara.
- g) Kertas suara dapat dibuat kedalam berbagai versi bahasa.
- h) Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara.
- i) Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur.

2.2.2. Pesantren

Secara etimologis pesantren merupakan Lembaga Pendidikan sekolah luar dan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh masyarakat karena lahir dan tumbuh dari masyarakat.

Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan, yang memberikan Pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Sedangkan pesantren merupakan gabungan dari kata pe-santri-an yang artinya tempat santri. Dari istilah diatas dapat kita simpulkan bahwa pesantren

adalah tempat atau asrama bagi santri yang mempelajari agama dari seorang Kyai atau Syaikh.²⁷

Ahmad Mustafa Harun mendefinisikan pesantren memiliki watak kemandirian yang memungkinkan untuk bertahan selama berabad-abad. Eksistensi pesantren dalam jangka waktu yang lama ini memungkinkan karakternya yang bias menyebabkan pesantren bergerak sesuai dengan perubahan sosial. Sedangkan Abdurahman Wahid mendefinisikan pesantren sebagai sebuah subkultural yang memiliki keunikan dan perbedaan cara hidup dari masyarakat pada umumnya.²⁸

Secara prinsip pesantren menekankan pentingnya kolektivitas atau kebersamaan lebih tinggi dari individualisme. Implikasi dari prinsip tersebut pesantren memberlakukan pendapat dalam masalah hak seseorang harus didahulukan, sedangkan dalam kewajiban harus diselesaikan dulu kewajiban seseorang harus melaksanakannya terlebih dahulu sebelum mengutamakan orang lain.

A. Dayah di Aceh

Dayah (Bahasa Aceh) adalah nama Lembaga yang dikenal dengan sebutan pesantren di Jawa atau surau di Padang atau pondok di Thailand. Kata *dayah* ini berasal dari kata Bahasa Arab “*zawiyah*” secara literal *zawiyah* berarti sudut, yang

²⁷ M. Bahari Ghazali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001) hal. 15.

²⁸ Mahpudin Noor, *Potret Pesantren* (Bandung: Humaniora, 2006) hal. 3

diyakini masyarakat Aceh pertama kali digunakan sudut masjid Madinah Ketika nabi mengajarkan para sahabat di awal Islam.

Dayah di Aceh merupakan Lembaga Pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islami, kelak akan jadi umat yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dayah di Aceh dapat dikatakan sebagai bapak Pendidikan Islam yang didirikan berdasarkan tuntutan dan kebutuhan zaman. Dayah harus mampu melahirkan kader-kader atau dai yang mampu mengembangkan agama Islam.

Seiring berjalannya waktu dayah di Aceh telah berkembang pesat, saat ini terdapat dua jenis dayah yaitu dayah salafiyah (tradisional) masih bertahan dengan sistem Pendidikan yang diwariskan turun temurun. Kebanyakan pemimpin dayah tradisional dipimpin secara turun temurun pula.²⁹ Kemudian saat ini terdapat juga dayah modern, dayah modern muncul karena memang ada tuntutan yang harus dipenuhi di era modern sekarang ini, terutama tuntutan integrasi ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum dayah yang pada awalnya cenderung dualisme. Disamping itu munculnya dayah modern disebabkan dayah tersubordinasi oleh Pendidikan yang mengadopsi kurikulum mata pelajaran umum karena zaman yang mulai berubah.

a) Dayah Tradisional

Dayah tradisional merupakan sebuah lembaga di mana para santri akan tinggal atau menetap di asrama yang telah disediakan oleh dayah tersebut.

²⁹ Marzuki, *Sejarah dan Perubahan Pesantren di Aceh*, Jurnal: Millah, Vol XI, No. 1, Agustus 2011. Hal. 222

Disamping itu para santri akan belajar dibawah bimbingan para guru atau sering disebut juga sebagai ustaz. Secara terminologi pesantren tradisional diartikan sebagai lembaga khas Indonesia yang di asuh oleh para kiyai/ustaz yang memiliki karismatik dengan menggunakan sistem asrama. Sedangkan metode pembelajaran di pesantren tradisional menggunakan sistem tradisional, yaitu masih memegang teguh pembelajaran tradisional menggunakan kitab-kitab klasik, untuk sistem pengajaran masih menggunakan sistem *halaqah* dengan pola pengajaran sorogan, bandongan dan wetona. Untuk kurikulum sendiri masih ditentukan oleh Kiai/ustaz pimpinan lembaga tersebut. Di pesantren tradisional Kiai dan santrinya masih disatukan dalam pola hidup kesalehan berpatokan pada kitab kuning.³⁰

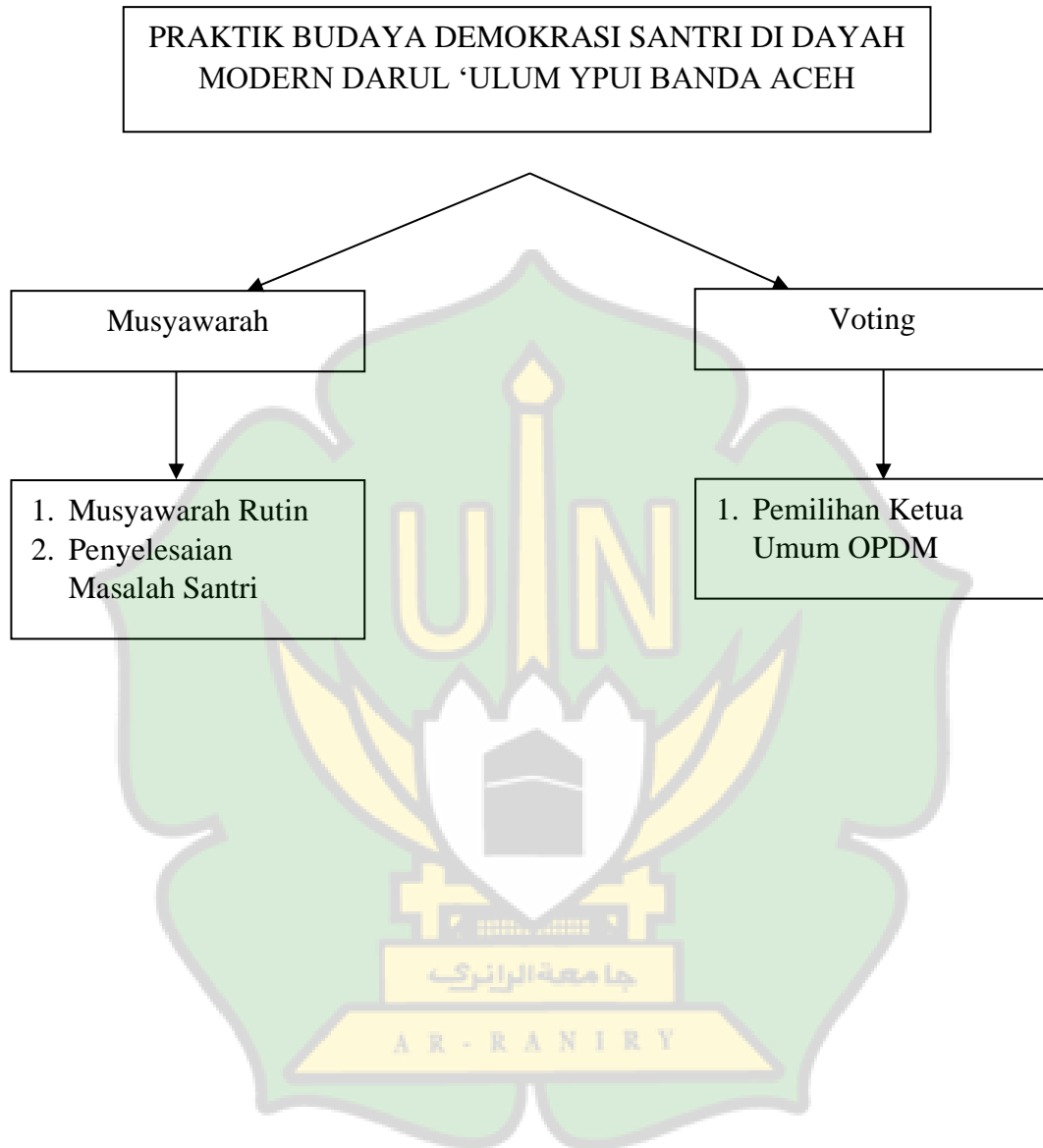
b) Dayah Modern

Dayah Modern berbeda dengan dayah tradisional baik itu di segi kurikulum maupun di segi pembelajaran. Sistem pembelajaran yang dipakai pada dayah modern yaitu menggunakan model klasikal, hal ini dapat kita lihat pada penerapan kelas belajar para santri baik itu dalam bentuk madrasah maupun sekolah dan kurikulum yang digunakan mengikuti kurikulum standar nasional. Disamping itu dayah modern juga memiliki sarana dan prasarana yang cukup canggih bahkan sudah menerapkan pembelajaran bahasa asing yang sudah memadai.³¹

³⁰ Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Indetitas* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 281.

³¹ Zarkasyi, *Langkah Pengembangan Pesantren dalam Rekontruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Religiusitas Iptek*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 220.

2.3. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode ini dilakukan deskriptif (kualitatif). Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang enim menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Rasional nya memilih metode deskriptif dalam kajian adalah agar memudahkan dalam menganalisis, mengkaji, dan mengungkapkan informasi argumentatif dan teoritik terkait praktik budaya demokrasi santri di dayah. Dengan menggunakan metode deskriptif, dapat diperoleh gambaran terkait tentang praktik budaya demokrasi santri di dayah secara lebih mendalam.³²

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan di bahas yaitu tentang budaya demokrasi, penulis akan mengkaji tinggi atau rendah nya demokrasi pesantren darul ulum Banda Aceh, bagaimana praktik Pesantren Darul Ulum Banda Aceh dalam melaksanakan budaya demokrasi, serta apa saja hambatan yang dialami oleh pihak Pesantren Darul Ulum Banda Aceh dalam mempertahankan Budaya Demokrasi.

³² Sugiyono. (2010) *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung: Afabeta

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi yang bertujuan untuk membatasi dan memperkecil ruang penelitian guna dapat membahas dan mengupas secara tajam dan fokus serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Pesantren Modern Darul Ulum, Jl. Syiah Kuala, Gp. Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana data diambil langsung dari lapangan, baik berupa dokumen, wawancara maupun observasi. Penelitian hukum empiris ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas masyarakat. Ronny Soemitro mengatakan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.³³

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan subjek dari mana data-data akan diperoleh. Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber data yang digunakan ada dua yaitu :

³³ Sugiyono. (2010) *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung: Afabeta

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Pencarian data primer bisa dilakukan dengan cara wawancara dengan responden secara langsung, melalui telepon, email dan sebagainya.³⁴ Data yang diperoleh dari sumber ini adalah hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan di Pesantren Modern Darul Ulum dengan tujuan untuk melihat bagaimana praktik budaya demokrasi santri yang ada di pesantren tersebut.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian pustaka yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, dari surat kabar, artikel, makalah dan dari ahli hukum serta pendapat dari para ahli yang peneliti kumpulkan sebagai dukungan dari sumber pertama.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi tanya jawab dengan masyarakat mengenai suatu masalah yang diperlukan untuk dimintai pendapat tentang suatu hal. Wawancara merupakan suatu metode yang

³⁴ Turah Suhono Dan Hanif Al Fatta, "Penyusunan Data Primer Sebagai Dasar Interoperabilitas Sistem Informasi Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Diagram Raci (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo)", Jurnal Jnanaloka, Vol. 2, No. 1, (2021), Hal. 36

digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi secara lisan yang nantinya akan mendapatkan tujuan yang diinginkan.³⁵

Tabel 3.1. Informan

No	Informan	Alasan	Jumlah
1	Santri putra dan Putri	Pihak Yang berinteraksi langsung di lingkungan Pesantren	5 Orang
2	Ketua Umum Organisasi Pengurus Dayah Modern (OPDM)	Pihak Pelaksana Harian Organisasi	1 Orang
3	Kepala Asrama Putra Dan Putri	Pihak pengontrolan santri di asrama	2 Orang
4	Ketua Bidang Humas Pesantren Darul Ulum	Dianggap memiliki informasi yang membantu penelitian karena Humas adalah salah satu bagian dari struktur inti pesantren.	1 Orang
5	Pimpinan dayah Pesantren Darul Ulum Banda Aceh	Pihak penanggung jawab harian di pesantren	1 Orang

2. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati suatu tempat. Pengamatan juga dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, dan tidak hanya sebatas observasi. Pencatatan juga

³⁵ Samsul. *Metodologi penelitian*. (Medan: Pustaka Medan 2016). Hlm. 37.

dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih konkrit dan jelas.³⁶ pada penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung, yaitu penulis sebagai observer secara langsung mengamati objek penelitian yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk kepentingan tersebut.³⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan berbagai catatan, transkripsi, buku, agenda, dan photo yang berhubungan dengan rumusan masalah dari sumber terpercaya dan akurat untuk memperkuat hasil penelitian ini.³⁸ Menurut Guba dan Lincoln dokumen sering dilakukan dalam penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, hasil pengkajian dokumen akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.³⁹

3.6. Teknik Analisis data

1. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang menyintesis data dari berbagai sumber. Menurut Institute of Global Tech, menjelaskan bahwa data Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada

³⁶ Suryana. *Metodologi penelitian*. (: Pustaka Medan 2016). Hlm. 58.

³⁷ *Ibid*. hlm. 76

³⁸ *Ibid*, hlm, 98

³⁹ Moleong, LJ (2010). *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito

bukti yang telah tersedia. Dengan cara menguji informasi dengan mengumpulkan data melalui metode berbeda, kelompok berbeda dan dalam populasi berbeda, penemuan mungkin memperlihatkan bukti penerapan lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpanan potensial yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal. Triangulasi menyatukan informasi dari penelitian kualitatif dan kuantitatif, menyertakan pencegahan dan kepedulian memprogram data, dan membuat penggunaan pertimbangan pakar.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh

Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh atau dalam bahasa Aceh sering disebut dengan istilah “Dayah Terpadu Darul ‘Ulum” YPUI Banda Aceh atau disingkat dengan Darul ‘Ulum merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Islam yang menganut Sistem Madrasah dan Santri yang bermukim di asrama dengan masa pendidikan 3 – 6 Tahun.

Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh didirikan oleh Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh pada tanggal 01 Juni 1990 di atas areal Komplek YPUI Banda Aceh seluas ± 48.938 m³, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 170 Tanggal 23 Oktober 1996. Komplek Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh ini tepatnya berada di Jalan Syiah Kuala Nomor 5 Kampung Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Ditetapkan nama Darul ‘Ulum mengandung suatu harapan agar Komplek YPUI Banda Aceh dapat menjadi lingkungan ilmu pengetahuan tempat lahirnya Generasi Penerus Islam yang berakhlak mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berfikiran bebas dengan landasan Iman dan Taqwa.

Proses kegiatan belajar-mengajar di Darul ‘Ulum dimulai pada Tahun Pelajaran 1990/1991 untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah santri/siswa 14 orang. Pada awalnya, Darul ‘Ulum hanya menampung santri laki-laki sampai dengan tahun ke-3 (Tahun Pelajaran 1992/1993). Kondisi ini

disebabkan karena pada awal berdirinya fasilitas yang tersedia masih sangat sederhana dan terbatas, sehingga belum memungkinkan untuk menampung santri putri.

Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Aceh umumnya dan Dayah Darul 'Ulum khususnya didukung penuh dengan harapan dan keinginan masyarakat yang terus meningkat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke Pesantren/Dayah ini, maka pada Tahun Pelajaran 1993/1994 setelah fasilitas memungkinkan -- meski sangat terbatas -- barulah dibuka 2 penerimaan bagi santri putri seiring dengan dibuka pula Madrasah Aliyah sebagai lanjutan dari jenjang Tsanawiyah yang telah ada.

Pada Tahun Pelajaran 1999/2000 Pesantren/Dayah Modern Darul 'Ulum juga membuka SMP Islam Darul 'Ulum yang secara Kurikulum tunduk pada KEMENDIKBUD, sekolah ini sesungguhnya bukanlah sekolah baru akan tetapi SMP Islam ini merupakan sekolah yang telah ada sejak semula dan berada pada satu lingkungan/komplek yang berdiri sendiri terlepas dari Pesantren/Dayah, baru kemudian pada Tahun Pelajaran 1999/2000 SMP Islam tunduk dibawah binaan Pesantren/Dayah Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh.

Dalam perkembangan selanjutnya, penambahan jumlah santri menunjukkan angka yang sangat signifikan; sampai dengan Tahun Pelajaran 2019/2020 santri Darul 'Ulum tercatat mencapai ±933 orang sesuai dengan kapasitas asrama dan muatan kelas yang ada. Meski dengan jumlah tersebut dirasakan kapasitas asrama dan muatan kelas sudah sangat padat, mengingat animo masyarakat yang sangat besar maka dengan sangat “terpaksa” Unsur

Pimpinan pesantren/Dayah dan Yayasan harus menerimanya. Jumlah ini sebenarnya telah mengalami proses penyeleksian yang sangat ketat, dimana pada setiap tahunnya Pesantren/Dayah harus menolak hampir 50 % dari jumlah pendaftar yang ikut ujian seleksi santri.

4.1.2. Visi Dan Misi Pesantren Darul Ulum

Berikut adalah Visi Dan Misi Pesantren Darul Ulum:

Visi

“Menghasilkan Generasi Islami yang Unggul Dalam Ilmu, Terampil Dalam Amal, Dan Mulia Dalam Akhlaq.”

Misi

1. Mendidik santri memiliki kesadaran beraqidah, beribadah, dan berakhlaq.
2. Membina pemahaman dan penghayatan terhadap Alqur’an dan Hadist
3. Membina santri menghafal Alqur’an dan membaca kitab kuning
4. Membina santri terampil dalam bahasa Arab dan Inggris
5. Mengembangkan potensi santri sesuai dengan bakat dan minat
6. Menumbuhkan semangat disiplin, hidup bersih, sehat dan nyaman.
7. Membudayakan berkata sopan santun, tawadhu’, qanaah, saling menghormati dan membantu

4.1.3. Kegiatan Santri Dilingkungan Pesantren

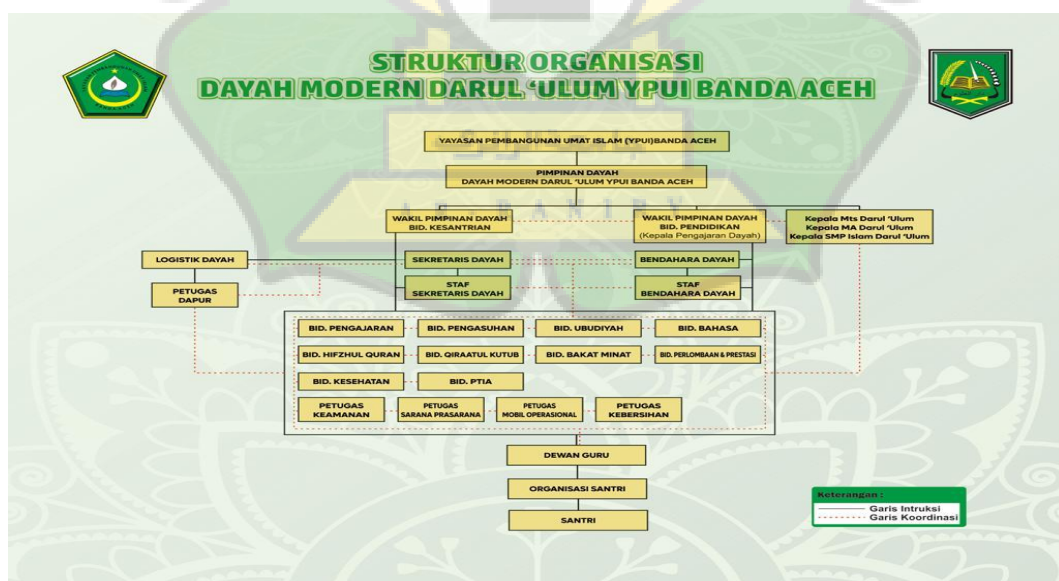
Sistem berkegiatan di Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh berlangsung selama 24 jam. Untuk itu, para santri diwajibkan menetap di asrama yang telah disediakan dan mengikuti segala bentuk program klasik maupun non

klasik. Pagi nya mereka solat subuh, sekolah dengan kurikulum pendidikan pada umumnya, kemudian siang nya dilanjutkan dengan pengajian kitab kuning sampai sore, malam nya dilanjutkan dengan kurikulum dayah ekstrakurikuler. Di setiap selesai Shalat santri melakukan kegiatan belajar mandiri.

4.1.4. Sarana Dan Prasarana

Sampai saat ini Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh telah memiliki beberapa sarana dan prasarana sebagai penunjang proses belajar mengajar seperti lap komputer, perpustakaan, lapangan olahraga dll. Diantara sarana dan prasarana tersebut merupakan bantuan dari berbagai donator baik dalam maupun luar negeri seperti bantuan pembangunan sekolah, mobil umum dll.

4.1.5. Struktur Pesantren Darul Ulum



Gambar 4.1. Struktur Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh

Sumber: HUMAS Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan pembahasan hasil penelitian berdasarkan masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian. Peneliti akan memaparkan hasil temuan dari wawancara, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan yang kemudian dianalisis dengan konsep dan teori yang menjadi landasan pustaka dalam penelitian.

4.2.1. Praktik Budaya Demokrasi Santri Di Dayah Modern Darul ‘Ulum

YPUI Banda Aceh

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*Demokratia*” yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata “*Demos*” dan “*Kratos*”. *Demos* yang memiliki arti rakyat dan *Kratos* yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.⁴⁰

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terlihat bahwa praktik budaya demokrasi yang diterapkan di Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh di awal dengan penyiapan lingkungan dayah dan peserta didik atau biasa disebut dengan santri. Lingkungan yang dimaksud adalah wujud gambaran karakter yang ingin dibentuk pada santri dalam mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagus semua santri, termasuk didalamnya visi, misi, serta saran dan fasilitas yang disediakan oleh dayah.

⁴⁰ Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal.125

Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Dayah Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh yang menyatakan bahwa.

*“ Santri Harus mempersiapkan diri sesuai dengan visi dan misi Dayah agar mampu menerima dan melaksanakan budaya demokrasi yang baik supaya lingkungan dayah tetap aman dan nyaman, sehingga santri memiliki karakter yang demokratis yang demokratis kita berlakukan hak dan kewajiban yang sama dalam kesehariannya dan mendapatkan perlakuan yang sama di semua santri ”.*⁴¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa santri memang betul-betul di bentuk karakternya sesuai dengan sistem demokrasi yang tidak luput dari hak dan kewajiban sebagai santri juga sesuai dengan visi dan misi dayah kemudian menjalankan keseharian dengan budaya yang demokrasi supaya lingkungan dayah tetap aman dan nyaman dalam berkegiatan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala asrama putra dan putri selaku petugas yang mengontrol santri menyatakan bahwa.

*“ iya di dayah ini santri benar-benar harus mempersiapkan diri mereka, artinya karakter mereka harus mampu bertahan, mental hidup yang kuat akan mampu menerima dan melaksanakan lingkungan yang berbudaya demokrasi agar tetap merasa nyaman dan aman, serta santri juga harus memiliki rasa tanggung jawab jujur dan adil dalam mengambil keputusan tanpa harus berkelahi ”*⁴²

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwasanya pembentukan karakter santri dengan budaya yang demokratis sangat dianjurkan ketika dimasukkan ke dayah supaya lingkungan tetap nyaman dan aman santri pun betah ketika bertahan sampai santri tamat.

⁴¹ Wawancara dengan Pimpinan Dayah Modern Darul ‘ulum Banda Aceh, Pada 16 November 2022

⁴² Wawancara bersama kepala asrama putra dan putri Dayah Darul ‘ulum YPUI Banda Aceh

Proses budaya demokrasi yang diimplementasikan di Dayah Modern Darul ‘Ulum Banda Aceh bertujuan agar santri mampu menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin tanpa harus berkelahi, sopan dan santun, jujur, serta bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Suryadi (2008: 135) mengatakan bahwa tiga karakter strategis yang harus dikembangkan, yaitu kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Proses penerapan dan penguatan nilai-nilai budaya ini haruslah menghindari cara-cara pemaksaan.

Berdasarkan hasil observasi yang didapat selama penelitian kedisiplinan Santri yang kemudian telah melaksanakan budaya demokrasi mendapatkan nilai-nilai karakter yang perlu diinternaslisasikan dan terbentuk dalam diri santri. Elemen ini berupa pembentukan karakter yang demokratis sesuai dengan visi misi dayah, strategi dalam pembentukan budaya demokrasi, keterlibatan orang tua, dan seluruh elemen yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan budaya demokrasi.

Beberapa nilai yang terbentuk dari pelaksanaan budaya demokrasi yaitu musyawarah, berkepribadian yang mandiri, religius, toleransi, proses pemilihan ketua organisasi.

Berdasarkan wawancara bersama kepala bidang humas dayah, menyatakan bahwasanya.

“ kehidupan di dayah semuanya sudah terprogram oleh waktu dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali Dengan adanya budaya demokrasi di dayah akan sangat baik bagi santri agar mereka bisa hidup mandiri, disiplin, bertanggung jawab atas amanah yang di berikan dan itu di tuntutan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari.

*Akan tetapi, ada juga batasan bagi mereka untuk tetap mematuhi peraturan yang ada”.*⁴³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwasanya kegiatan dayah telah terprogram, sudah terencana, peraturan yang ketat. Sehingga santri bertanggung jawab atas segala tindakannya. Semua santri yang berada di dayah diuntut untuk hidup mandiri contohnya seperti bangun tidur pagi dipercepat agar antrean mandi tidak lama sehingga bisa Shalat berjama'ah.

Dari pemaparan diatas dapat dianalisis bahwa, pesantren sebagai lembaga keagamaan yang bertujuan membentuk karakter santri yang mandiri serta berkepribadian yang baik, karena baik buruknya seseorang akan dilihat dari kelakuan dan tutur kata yang santun. Dengan demikian dayah bukan hanya lembaga pendidikan saja, melainkan dayah merupakan lembaga yang dapat membina dan mengembangkan karakter yang baik.

Penjelasan lebih lanjut tentang proses praktik budaya demokrasi santri dayah modern darul 'ulum dapat dilihat di bawah ini.

a. Musyawarah

Praktik budaya demokrasi di Dayah Modern Darul 'Ulum didasari melalui kebiasaan bermusyawarah. Budaya demokrasi pada dasarnya membiasakan hidup secara bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang ada dengan mendengarkan pendapat dari orang lain melalui musyawarah.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan ketua bidang humas Dayah Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh, 17 November 2022

⁴⁴ Regita Dyah dkk, *Analisis Budaya Demokrasi dan Pembentukan Karakter Peserta Didik Kelas V Al-Kautsar*, Jurnal Skripsi, Bandar Lampung, 2019. Hal 4.

Dalam kamus Bahasa Indonesia musyawarah diartikan sebagai pembahasan Bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama, disamping itu musyawarah juga diartikan berunding atau berembuk.

Secara terminologi Abdul Hamid mendefinisikan musyawarah berarti saling merundingkan atau memberikan pendapat mengenai suatu persoalan atau mengeluarkan pendapat dari berbagai pihak kemudian dipertimbangkan dan diambil keputusan sesuai kesepakatan bersama.

Dari teori tersebut, penulis mencoba untuk melihat dan menilai pengembangan santri dalam berdemokrasi dengan kebiasaan bermusyawarah.

Berdasarkan wawancara dengan salah santri putra dan putri mengatakan bahwasanya.

*"kami selaku santri sekarang dituntut untuk sering bermusyawarah dalam hal ketika ingin memberikan suatu masukan kepada pengurus OPDM dan kepada dayah itu sendiri demi kenyamanan kami selama menetap di dayah , supaya OPDM dapat melaksanakan kegiatan atau programnya dengan baik"*⁴⁵

Hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwasanya santri di dayah darul ‘ulum diharuskan untuk bermusyawarah ketika ingin memberikan masukan kepada OPDM, dengan itu pihak OPDM akan memikirkan kembali saran santri yang di dampingi langsung oleh ustad dan ustazah demi kelancaran program-program kegiatan kedepannya.

⁴⁵ Wawancara dengan santri putra dan putri Dayah Modern Darul ‘Ulum Banda Aceh



Gambar 4.2. Musyawarah rutin yang dilakukan santri putri untuk memberikan saran dan masukan ke OPDM

Sumber: Dokumentasi penulis

Berdasarkan wawancara dengan ketua umum OPDM mengatakan bahwasanya.

“selaku pelaksanaan atau pembantu ustad dan ustazah sebagai pengontrol santri dalam kegiatan hariannya kami memiliki tanggungjawab yang besar, dengan di berikannya amanah ini saya selaku ketua umum sering melakukan agenda musyawarah sebelum mengambil keputusan tertentu, dengan musyawarah banyak kemungkinan besar mendapatkan jalan keluar”⁴⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwasanya ketua umum OPDM sangat terbuka, para santri dipersilahkan untuk memberikan saran dan masukan asal itu demi kemaslahatan santri selama berada di dayah, dan tentu saja ketua umum harus mendiskusikannya kepada pengurus lainnya agar mendapatkan solusi yang baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang humas dayah modern darul ‘ulum mengatakan bahwasanya.

⁴⁶ Wawancara dengan ketua umum OPDM Dayah Modern Darul ‘Ulum Banda Aceh

“iya memang benar bahwasanya mereka santri apalagi pengurus OPDM harus sering melakukan musyawarah, kami selaku usatidz disini memberikan arahan tersebut agar mereka belajar menghargai pendapat orang lain, karena nantinya sistem ini bisa mereka pakai dikemudian hari ketika mereka terjun ke dalam masyarakat langsung”⁴⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwasanya, di dalam agenda tertentu mereka di haruskan bermusyawarah, karena dengan begitu mereka dapat mempelajari suatu makna dari musyawarah dengan mendengarkan pendapat orang lain sehingga nantinya mendapatkan keputusan atau jalan keluar yang baik, dan ketika mereka keluar nanti dari dayah mereka bisa mengaplikasikannya ke keluarganya dan ke masyarakat.

Selain itu, berdasarkan pengamatan di lapangan, kebebasan santri dalam mengemukakan pendapat sangat diapresiasi oleh pihak dayah, dengan disediakannya fasilitas kotak saran dan majalah dinding guna memfasilitasi santri kepada pengurus OPDM, bahkan kepada pihak dayah, melalui asatidz pengasuh santri merasa terfasilitas untuk bebas mengutarakan segala sesuatu yang membuatnya tidak merasa nyaman.

Sesuai observasi yang di dapat selama penelitian berlangsung, kebebasan mengemukakan pendapat juga terfasilitas ketika pembelajaran pendidikan berlangsung, santri saling berargumentasi tentang hal internal dayah maupun eksternal namun tetap menghargai pendapat santri lainnya yang berbeda. Hal ini terlihat ketika peneliti melihat secara langsung ketika proses pembelajaran berlangsung bersama dengan santri.

⁴⁷ Wawancara dengan kepala bidang humas Dayah Modern Darul ‘Ulum Banda Aceh

Berdasarkan fakta diatas yang dikuatkan oleh pendapat Regita Dyah bahwa Budaya demokrasi pada dasarnya membiasakan hidup secara bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang ada dengan mendengarkan pendapat dari orang lain melalui musyawarah.

Sejalan dengan pandangan diatas dapat dianalisis bahwa, praktik budaya demokrasi yang diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari seperti mengemukakan pendapat, terjadi ketika musyawarah berlangsung, dimana santri dibiasakan untuk dapat mengambil keputusan secara mufakat, dan menghargai ketika santri lain berbeda pendapat. Selain itu dalam pembiasaan kegiatan luar kelas, santri dibiasakan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan latihan kepemimpinan menjadi pengurus OPDM, dalam hal ini santri dibiasakan untuk lebih demokratis dalam mengambil keputusan dan dilakukan musyawarah untuk lebih baik kedepannya.

Berdasarkan wawancara dengan santri putra dan putri, mengatakan bahwasanya.

“Jadi musyawarah ini hanya dilakukan oleh pihak OPDM dan pihak dayah, untuk keputusannya apakah di keluarkan kebijakan itu atau tidak itu tergantung dari pihak dayah, apabila itu demi kesenangan santri maka kebijakan yang di musyawarahkan kebanyakan di setuju, contohnya pelaksanaan acara maulid, exhibition, rihlah moment dll.”⁴⁸

⁴⁸ Wawancara bersama santri putra dan putri Dayah Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya, dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh pihak OPDM dan dayah membuahakan hasil, sehingga praktik budaya demokrasi dengan mekanisme musyawarah berjalan dengan baik.



Gambar 4.3. Dokumentasi Hasil Musyawarah
 Sumber: Humas Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh



Gambar 4. 4. Dokumentasi Hasil Musyawarah
Sumber: Humas Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh

Dari hasil dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwasanya, musyawarah yang dilakukan membuahkan hasil. Pihak dayah tentunya juga sangat mengapresiasi terhadap santri yang sangat aktif demi kemaslahatan dayah, ketika mendapatkan ide-ide kreatif dari santri tentu saja pihak dayah sangat terbuka untuk menampung ide mereka karena dengan ide merekalah dayah ini hidup dan santri pun merasa diperlukan untuk dayah.

b. Pemilihan Umum Ketua OPDM

Salah satu bentuk praktik budaya demokrasi yang diterapkan di Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh adalah dengan melakukan pemilihan umum Ketua OPDM. Organisasi Pelajar Dayah Modern atau disingkat dengan OPDM adalah Salah satu struktur Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda, dimana peran OPDM dalam menunjang pencapaian visi dan misi dayah tidak

dapat di kesampingkan. Seperti yang di sampaikan oleh Sari Yuni bagi organisasi yang menerapkan prinsip demokrasi, pemilihan umum menjadi salah media untuk pengambilan keputusan tertinggi seperti pemilihan presiden atau pun ketua umum.⁴⁹

Adapun Tujuan dari voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan perhitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan voting perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali.⁵⁰

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh, mengatakan bahwasanya

“ iya benar kami memiliki organisasi santri biasa disebut dengan OPDM, peran organisasi ini sangat besar untuk mengatur santri dalam kegiatan harian dari bangun tidur hingga tidur kembali sebagai contoh saat membangunkan sholat subuh menjaga ketertiban saat sholat 5 waktu, apel ketika mau belajar madrasah, itu adalah bagian kegiatan yang kecil, kalau yang kegiatan besar mereka mempersiapkan acara hari besar islam, wisuda, pelantikan pengurus, exhibition, dll”⁵¹

Hasil wawancara dengan pimpinan dayah dapat disimpulkan bahwasanya organisasi santri ini sangat berperan besar dalam berkontribusi positif di lingkungan dayah dimulai dengan kegiatan harian maupun kegiatan tahunan yang berbentuk event kecil maupun besar.

⁴⁹ Jaleha, S., & Suriyani, E. (2020). *Op.Cit.* Hal 1253

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Wawancara dengan pimpinan Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh



Gambar 4.5. Pelantikan pengurus OPDM

Sumber: Dokumentasi penulis

Adapun pemilihan ketua umum OPDM ini dilakukan secara pemungutan suara atau voting dimana setiap tahunnya berganti kepemimpinan setiap satu tahun sekali artinya satu angkatan satu periode. Proses demokrasi yaitu secara voting, pelaksanaan pemilihan ketua OPDM dilakukan melalui tiga tahap yaitu seleksi calon ketua, pengumuman suara, perhitungan suara, dan menyampaikan hasil perhitungan suara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang humas dayah mengatakan bahwasanya.

“ kami memilih ketua OPDM ini secara voting kemudian melalui tahapan musyawarah letting, lalu di berikan nama-nama tersebut, diseleksi oleh pihak pembina dan sebagian ustad, barulah nantinya akan di tempelkan nama calom ketua umum OPDM dan mereka di berikan 3 hari untuk kampanye sebelum jadwal pemilihan dan yang terakhir yaitu pemilihan dilakukan dengan voting yang dilaksanakan oleh seluruh warga dayah, pemilu dengan metode voting ini sangat membantu dalam pelaksanaan

*pemilihan ketua umum OPDM ini, yang tentu nya sangat aman dan demokrasi”.*⁵²

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya pemilihan dengan cara voting sangat efisien membuat suasana aman dan demokrasi dan juga sebagai media penentu ketua umum OPDM sesuai yang dikemukakan oleh Jahela dan Surihani, voting merupakan salah satu media dalam pengambilan keputusan pemilihan kepala daerah hingga presiden. Dalam dunia yang berdemokrasi, oleh karena itu, voting membutuhkan regulasi dan prosedur agar lebih menjamin kerahasiaannya serta dapat berjalan dengan jujur dan transparansi.



Gambar 4.6. Proses pemilihan ketua umum OPDM

Sumber: Humas OPDM

Berdasarkan wawancara dengan santri dayah darul ‘ulum sebagai pelaksana kegiatan pemilihan, menyatakan bahwasanya.

“ iya memang benar sistem pemilihan ketua OPDM memang begitu adanya, kami sebagai santri pun merasa bangga dengan adanya kontribusi di dayah dalam pemilihan ketua OPDM dan

⁵² Wawancara dengan ketua Bidang Humas Dayah Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh

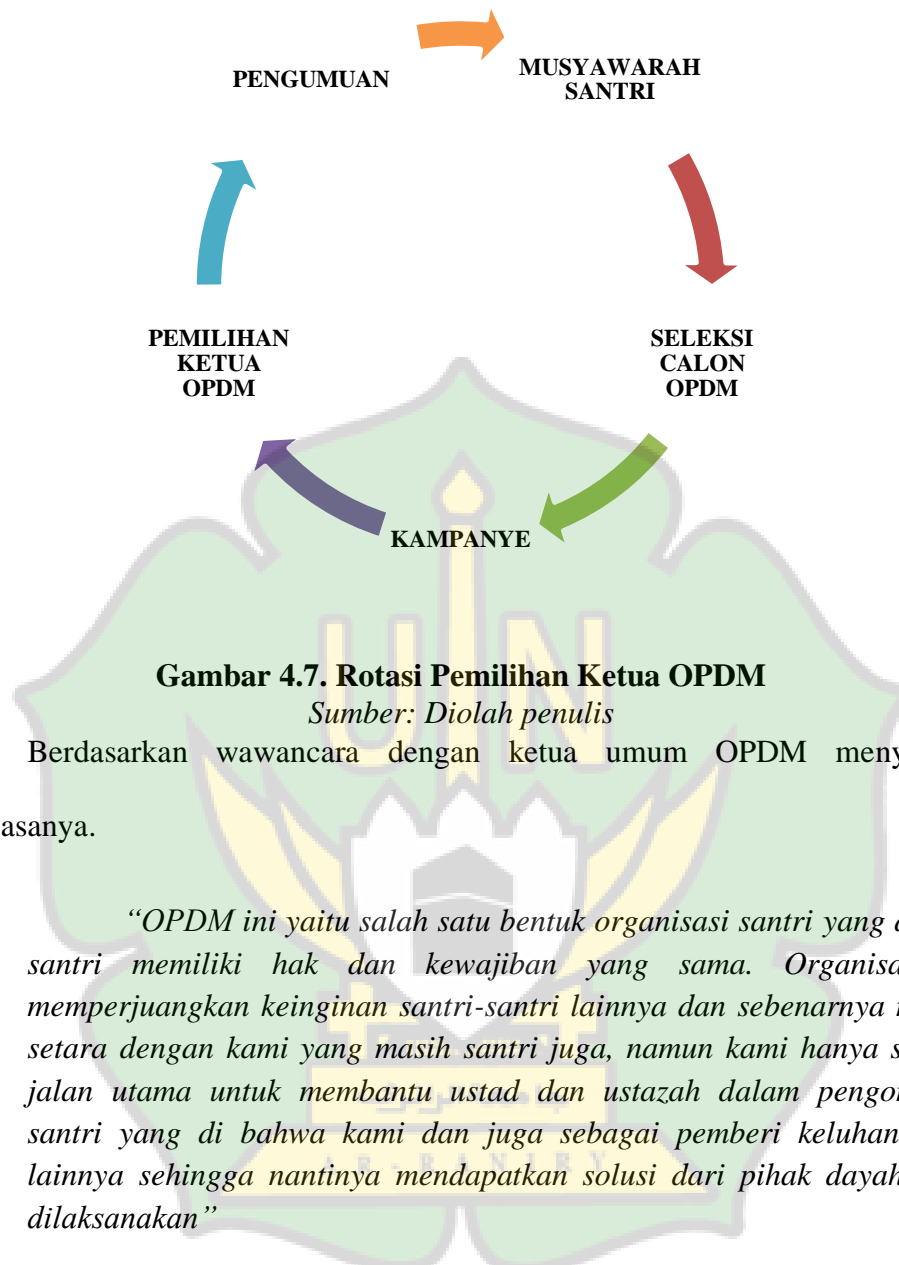
merasa senang juga ketika diberlakukannya sistem ini karena ada keadilan didalam nya”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwasanya praktik budaya demokrasi dengan sistem pemilihan umum berdampak positif bagi lingkungan Dayah Darul ‘Ulum, santri merasa diprioritaskan dan merasa di perlukan yang kemudian nantinya juga akan memiliki kesempatan yang sama dengan sistem yang sama.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang penulis dapatkan bahwasanya praktik budaya demokrasi yang terdapat di dayah darul ‘ulum yaitu kegiatan pemilihan umum secara voting memang benar adanya. Santri melakukan pencoblosan secara berurutan yang diawali oleh santri kelas satu hingga yang terakhir yaitu pimpinan dayah.

Berdasarkan hal tersebut OPDM ini adalah sebagai bentuk organisasi yang banyak memberikan kontribusi positif untuk dayah. Sehingga dapat di analisis bahwasanya kegiatan pemilihan umum dengan sistem voting dapat memberikan dampak positif bagi dayah, santri merasa adil karena ada nya kesamaan dan kesempatan untuk menjadi ketua umum OPDM nantinya.

⁵³ Wawancara dengan santri Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh



Berdasarkan wawancara dengan ketua umum OPDM menyatakan bahwasanya.

“OPDM ini yaitu salah satu bentuk organisasi santri yang dimana santri memiliki hak dan kewajiban yang sama. Organisasi ini memperjuangkan keinginan santri-santri lainnya dan sebenarnya mereka setara dengan kami yang masih santri juga, namun kami hanya sebagai jalan utama untuk membantu ustad dan ustazah dalam pengontrolan santri yang di bahwa kami dan juga sebagai pemberi keluhan santri lainnya sehingga nantinya mendapatkan solusi dari pihak dayah untuk dilaksanakan”

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini yang diperkuat dengan pendapat Abraham Lincoln bahwasanya demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁵⁴ Di dalam dayah yang memiliki budaya demokrasi, santri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam menjalankan organisasi santri. Supaya demokrasi ini bisa berjalan sebagaimana yang

⁵⁴ Paul Fors, Bryant, *History Of American Political Thought*, (America: Lexington Books, 2003). Hal 395.

seharusnya, maka setiap santri di haruskan saling bekerja sama, saling menghormati, saling mempercayai, adanya solidaritas yang mengakui kesamaan sehingga santri dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

4.2.2. Hambatan Dalam Praktik Budaya Demokrasi santri Di Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh

Ada beberapa hambatan yang di hadapi oleh Dayah Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh dalam praktik budaya demokrasi santri, sebagai berikut :

a. Ustad dan ustazah

Hambatan juga terkadang datang dari ustadz dan ustazah sendiri, tentu saja dalam mengembangkan karakter santri perlu nya ustad dan ustazah yang paham akan karakteristik santri-santri karena orang tua kedua santri, maka oleh karena itu asatidz harus menjadi contoh yang baik, kadi *ibda binnafsik* (memulai dari diri sendiri) memantaskan diri, menjadi tauladan bagi santri, namun terkadang tidak semuanya bisa memahami karakteristik santri, mengambil keputusan sepihak sehingga masih ada yang harus di benahi pada diri asatidz sehingga menjadi contoh yang baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang Humas menyatakan bahwa:

“ dalam mengembangkan budaya demokrasi santri, ustad dan ustazah juga harus memberikan contoh dengan baik dan memperlihatkan nilai budaya demokrasi yang baik kepada santrinya, tapi ada beberapa ustad dan ustazah yang memang masih belum maksimal untuk memberikan contoh yang baik banyak

yang lalai kemudian kadang mengambil keputusan sebelah pihak”⁵⁵

Hasil wawancara dengan kepala bidang humas dayah menyatakan bahwa, dalam mengembangkan budaya demokrasi santri, itu terkadang berasal dari ustad dan ustazah itu sendiri. Kurang nya dalam pengalaman untuk mendidik santri ,apalagi yang baru menjadi pendidik kadang juga lalai dalam bekerja sehingga santri terlepas begitu saja.

Menurut pimpinan dayah ustad dan ustazah merupakan orang tua kedua santri yang memiliki tanggung jawab yang penuh dalam perkembangan karakter santri selama di dayah. Oleh karena itu, ustad dan ustazah di haruskan bekerja dengan maksimal agar santri tidak terlepas begitu saja tanpa pengontrolan yang penuh, supaya santri juga mendapatkan binaan yang lebih intens.

b. Santri

Hambatan pun datang dari diri santri. Santri merupakan elemen penting dalam dayah, santri merupakan murid-murid yang menetap dan belajar ilmu-ilmu agama di dayah. Santri mencerminkan karakter-karakter baik yang patut di tiru oleh orang lain, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, menciptakan hubungan yang harmonis dengan Allah SWT melalui Shalat, Shalat merupakan cara manusia berdialog dengan Sang Pencipta, Shalat juga memberikan ketenangan lahir dan batin. Ketenangan batin akan mendamaikan hati manusia sehingga akhlak pun akan terjaga.

⁵⁵ Wawancara dengan kepala asrama putra dan putri Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan dayah dan kepala bidang Humas dayah menyatakan bahwa:

“Tentu saja ada setiap proses pengembangan budaya demokrasi tidak terlepas dari segala hambatan yang ada apalagi santri-santri yang memang baru pertama sekali merasakan hidup di dayah, mungkin di rumah mereka terbiasa di manjakan dengan kasih sayang yang berlebihan.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dayah dan ketua bidang humas Dayah diketahui bahwa dalam praktik budaya demokrasi santri tentu saja tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kendala. Menurut ketua bidang humas hambatan praktik budaya demokrasi itu muncul dari santri itu sendiri, karena tidak semua santri yang datang ke dayah mempunyai karakteristik yang sama, anak yang membangkang, anak yang memberontak dan yang paling kendala yaitu anak yang manja. Hal ini diindikasikan karena santri tidak terbiasa dengan keadaan yang menuntut santri untuk mandiri dan penuh dengan disiplin, santri terbiasa dimanja oleh orang tua dengan kasih sayang yang berlebihan, sehingga santri merasa kaget ketika berada di dayah dan tidak betah untuk menetap di dayah.

Perbedaan latar belakang santri yang datang ke dayah, merupakan salah satu hambatan dalam membina dan mengembangkan budaya demokrasi karena perbedaan latar belakang santri yang beragam tersebut, terutama lulusan SMP dari sekolah umum, kemudian melanjutkan SMA di Dayah Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh, santri tersebut sudah biasa pergaulan di luar yang bebas tidak banyak aturan, kemudian santri yang memang sudah kecanduan merokok sehingga membutuhkan pembinaan yang lebih ekstra.

⁵⁶ Wawancara dengan pimpinan Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh

Tidak semua santri yang datang ke Dayah Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh yang sama, santri yang membangkang, santri yang memberontak dan yang paling menjadi kendala adalah santri yang manja. Hal ini diindikasikan karena santri tidak terbiasa dengan keadaan yang menuntut santri mandiri dan penuh dengan disiplin, santri terbiasa dimanja oleh orang tua dengan kasih sayang yang berlebihan dengan hidup yang nyaman. Sehingga santri merasa kaget dan tidak betah berada di dayah.

4.2.3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Dalam Praktik Budaya Demokrasi Santri

Secara umum upaya yang dilakukan Dayah Modern Darul ‘Ulum untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam praktik budaya demokrasi santri adalah sebagai berikut :

a. Ustad dan ustazah

Setiap ada hambatan pastinya ada solusi untuk memaksimalkan pengembangan budaya demokrasi santri, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dayah selalu menyelesaikan secara kekeluargaan, karena kesalahpahaman sehingga semuanya dapat menemukan jalan keluar permasalahan.

“salah satu upaya nya kami membuat evaluasi bulanan untuk mengatasi permasalahan asatidz dengan santri dan memberikan arahan sekaligus peringatan, yang memimpin itu pastinya pimpinan sendiri”⁵⁷

Ada hambatan ada pula solusi, menurut pimpinan Dayah Modern Darul ‘Ulum selalu mengadakan evaluasi bulanan untuk mengatasi hambatan yang

⁵⁷ Wawancara dengan kepala bidang humas Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh

timbul oleh kelalaian ustad dan ustazah, yang dilakukan bersama pimpinan dan semua pengurus dayah, hal ini dilakukan agar meminimalisir ketidak sepahaman dan masalah yang di hadapi ustad dan ustazah selama membina santri, memberikan pembekalan kepada ustad dan ustazah serta mengingatkan kembali peran asatidz yang merupakan tauladan santri.

Hal diatas menunjukkan bahwa kesesuaian data yang ditemukan dalam penelitian bahwasanya dayah diidealkan dapat menjadi agen perubahan sosial. Berdasarkan hal tersebut dayah sebagai lembaga pendidikan telah banyak memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan manusia yang religius.

b. Santri

Dalam menyelesaikan hambatan kepada santri pimpinan dan kepala asrama biasanya menggunakan keteladanannya dan pendekatan dengan memberikan nasehat dan teguran, kemudian memberikan sanksi kepada santri agar jera ketika membuat kesalahan, memberikan pemahaman dampak positif dan negatif dari apa yang dilakukan oleh santri. Biasanya santri akan memahami semua masukan yang diberikan oleh asatidz, kadang juga sering mengundang orang tua santri selain untuk sarana silaturahmi juga supaya memberikan perkembangan santri, serta untuk mengajak orang tua *sharing* mengenai kendala dalam membina dan mengembangkan karakter santri.

“mengatasi santri yang manja dan memberontak kami sering mengingatkan mereka setiap habis solat insya upaya untuk membiasakan diri hidup sederhana disiplin, sehingga mereka

nantinya akan terbiasa dan betah tinggal di dayah sampai mereka tamat nantinya.”⁵⁸

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwasanya untuk mengatasi santri yang manja dan pemberontak, dayah Modern Darul ‘Ulum membiasakan santri untuk hidup sederhana, hidup mandiri, dengan bimbingan ustad dan ustazah selaku orang tua kedua selama di dayah. Serta melakukan pendekatan antara asatiz dan santri, sehingga asatiz bisa memosisikan selain sebagai orang tua kedua di dayah, namun juga memosisikan diri sebagai teman dekat santri. Sehingga santri mau berbagi keluh kesah layaknya kepada orang tua dan teman.

Selain itu, untuk mengatasi santri pindahan dari sekolah lain, dilakukan pembinaan khusus yaitu dengan mengadakan kelas khusus selama satu tahun, selain untuk membina kepribadiannya juga untuk membiasakan santri untuk disiplin, juga memberikan pembelajaran yang setara sehingga santri bisa mengikuti pembelajaran dengan kurikulum yang di terapkan di Dayah Modern Darul ‘Ulum Banda Aceh.

⁵⁸ Wawancara dengan kepala asrama Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas tentang Praktik Budaya Demokrasi Santri Dayah Darul ‘Ulum YPUI Banda aceh dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Praktik budaya demokrasi santri di dayah modern darul ‘ulum dilakukan melalui:
 - a. Proses pembelajaran dan praktik sistem demokrasi dengan metode musyawarah, banyak menghasilkan kebijakan yang positif untuk santri.
 - b. Proses pembelajaran dan praktik sistem demokrasi dengan metode voting, menciptakan santri-santri yang aktif dalam menyuarakan pilihan mereka.
2. Hambatan-hambatan yang di hadapi Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh dalam praktik budaya demokrasi santri diantaranya yaitu :
 - a. Perbedaan latar belakang didikan orang tua santri, mengakibatkan beberapa santri tidak terbiasa dengan sistem demokrasi, seperti bermusyawarah, tidak taat peraturan dan lain sebagainya.

3. Upaya-upaya dalam menghadapi hambatan praktik budaya demokrasi santri dayah modern darul 'ulum YPUI banda aceh sebagai berikut :
 - a. Memberikan bimbingan yang lebih intens kepada santri yang memberontak, membiasakan hidup lebih sederhana, mandiri dan bertanggung jawab.
 - b. Mengadakan evaluasi rutin setiap bulannya untuk mengatasi hambatan atas kelalaian asatidz, agar meminimalisir ketidaksepahaman dan masalah-masalah yang di hadapi oleh asatidz kepada santri.

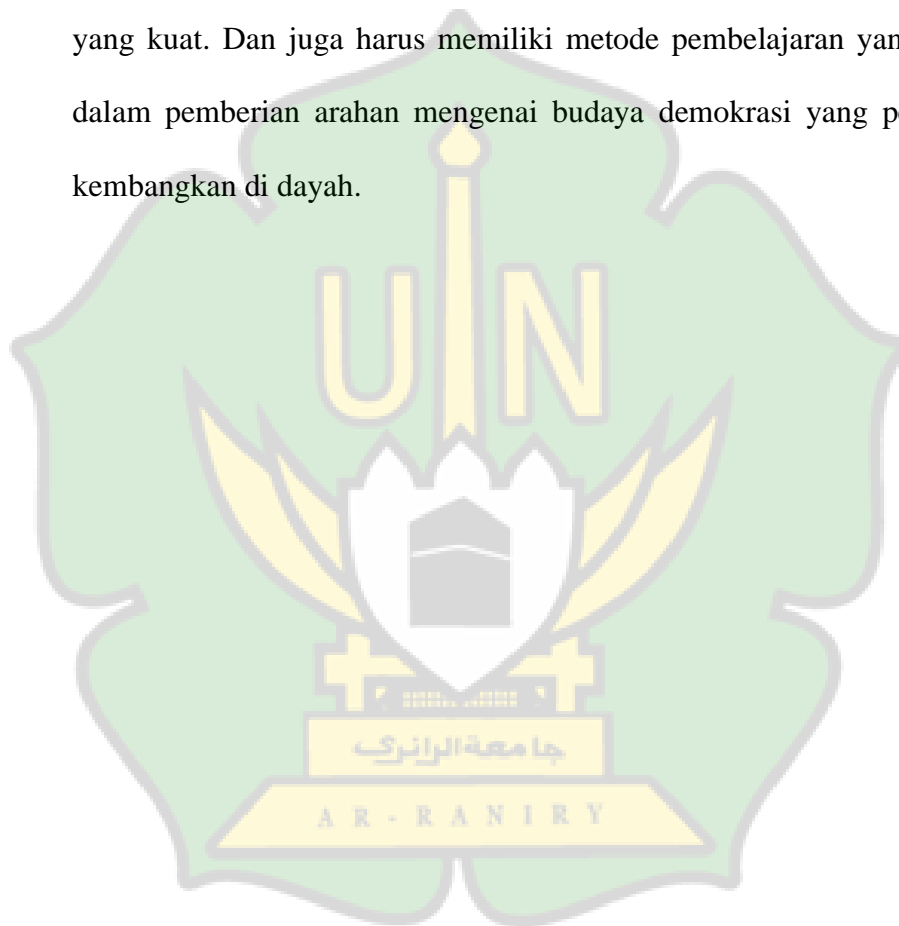
5.2. Saran

Berdasarkan pengalaman di lapangan dan informasi yang diperoleh, kiranya peneliti dapat memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Pimpinan dayah hendak selalu mempertahankan karakter santri yang demokratis yang di kembangkan dalam membina santri, sehingga menciptakan kader yang bermoral dan bermental kuat, agar santri tidak tercabut dari realitas sosial yang kekinian dan tidak juga meninggalkan ajaran-ajaran yang sudah dipelajari dari dayah.
2. Santri yang merupakan kader dayah haruslah patuh terhadap peraturan yang diterapkan oleh dayah, serta selalu mendukung pembinaan dalam praktik budaya demokrasi agar terciptanya pribadi santri yang baik dan santun. Kemudian santri tidak menjadi pribadi yang manja, serta dapat mengembangkan karate yang disiplin mandiri, bertanggung jawab dan

menghargai pendapat orang lain, sehingga ketika terjun di masyarakat dapat menjadi pribadi yang baik.

3. Ustad dan ustazah harus menjadi tauladan yang baik bagi santri yang mereka bina, sehingga terciptanya santri dan santriwati yang berkarakter demokratis dan dilandasi dengan kepercayaan dan mental yang kuat. Dan juga harus memiliki metode pembelajaran yang baik dalam pemberian arahan mengenai budaya demokrasi yang perlu di kembangkan di dayah.



DAFTAR PUSTAKA

Sutrisno. (2011). Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam. *Fadilatama*.

Sutrisno, M. (2000). *Demokrasi Semudah Ucapankah? Penerbit kanisius*.

Abdurrahman Wahid, *Pesantren Sebagai Subkultur*, dalam M Dawam Raharjo,
Pesantren dan Pembaruan (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 40-60

Dewi, Dwi Ratna, *Kajian Tentang Budaya Demokrasi Di Pesantren Dalam
Mengembangkan Civic Disposition Santri : Studi Deskriptif di
Pesantren Al-Basyariah Bandung* , 2013

Agusta, L. *Politik Demokrasi Tanpa Budaya Demokrasi. Pidato Kebudayaan.*
2013

Ahmad, Z. A, *Republik Islam Demokrasi*, Deli: pustaka Maju. 1951

Gafar, Afan. (2006). *Politik Indonesia Transisi menuju demokrasi*. (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar). Hal. 3

Suyatno, *Menjelajah Demokrasi*. (Bandung: Humaniora2008).

Paul Fors, Bryant, *History Of American Political Thought*, (America: Lexington
Books, 2003). Hal 395.

Bambang Yuniarto, *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi*, (Yogyakarta:
Deepublish, 2018), hal. 89-92.

Regita Dyah dkk, *Analisis Budaya Demokrasi dan Pembentukan Karakter Peserta Didik Kelas V Al-Kautsar*, Jurnal Skripsi, Bandar Lampung, 2019. Hal 4.

Qurays Shihab, *Ensiklopedia Al-Quran Kajian Kosakata*, (Jakarta, Lentera Hati, 2007), hal 966.

Dudung Abdullah, *Musyawaharah dalam Al-Quran (suatu kajian tematik)* Jurnal: Ad-Daulati, Vol. III, No. 2, Desember 2014, hal. 245

Muhammad Hanafi, *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal: Cita Hukum, Vol. I, No. 2. Desember 2013.

Rozi, C. F., & Dewi, S. V. (2020). *Rancang bangun aplikasi e-voting pemilihan geuchik pada kecamatan kluet utara (sk: di desa krueng batee) berbasis web*. Journal of Informatics and Computer Science, 6(1), 1-10.

Ramdhani, A. I., & Marwanto, E. (2022). *Perancangan Program Aplikasi E-Voting Untuk Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Pada Kampus Stmik Bani Saleh Menggunakan Framework Laravel*. *Jurnal Gerbang STMIK Bani Saleh*, 12(2).

Jaleha, S., & Suriyani, E. (2020). *Implementasi Sistem E-Voting Dilihat Aspek Komunikasi Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong*. *Japb*, 3(2), 1253-1264.

M. Bahari Ghazali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001) hal. 15.

Mahpudin Noor, *Potret Pesantren* (Bandung: Humaniora, 2006) hal. 3

Marzuki, *Sejarah dan Perubahan Pesantren di Aceh*, Jurnal: Millah, Vol XI, No. 1, Agustus 2011. Hal. 222

Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Indetitas* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 281.

Sugiyono. (2010) *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung: Afabeta

Samsul. *Metodologi penelitian*. (Medan: Pustaka Medan 2016). Hlm. 37.

Suryana. *Metodologi penelitian*. (: Pustaka Medan 2016). Hlm. 58.

Moleong, LJ (2010). *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito

Qurays Shihab, *Ensiklopedia Al-Quran Kajian Kosakata*, (Jakarta, Lentera Hati, 2007), hal 966.

LAMPIRAN



Wawancara bersama Pimpinan Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh



Wawancara bersama kepada bidang humas Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI
Banda Aceh



Aktivitas santri sehabis shalat dengan belajar mandiri



Salah satu kegiatan atau event yang di selenggarakan oleh pihak OPDM



Wawancara bersama ketua umum OPDM Dayah Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh

